



PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

**LKIP
2020**





WALIKOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikanNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat selesai tepat waktu. Penyusunan LKIP sebagai wujud Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan penuh integritas.



Walikota Bukittinggi
H. ERMAN SAFAR, SH

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Laporan Kinerja Tahun ke-V (Lima) implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021. Materi laporan menguraikan capaian sasaran yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bukittinggi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. karena jalannya Pemerintahan Kota Bukittinggi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan

dukungan aktif segenap komponen daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi Negara yang ada.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi hingga Tahun 2020 sangat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, meskipun secara regional dan global upaya membangun daerah sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 yang begitu menguras tenaga dan pikiran.

Akhir kata, kami sangat berharap kiranya agar laporan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini dapat dijadikan sarana evaluasi untuk jalannya pemerintahan yang lebih efektif dan efisien kedepannya. menjadi media pertanggungjawaban kinerja, serta peningkatan kinerja dan komitmen bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Bukittinggi, Maret 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

H. ERMAN SAFAR, SH



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020 menyajikan informasi atas pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam penetapan kinerja Tahun 2020. Berbagai capaian tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bukittinggi.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur sipil negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembaharuan sistem administrasi Negara.

Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021. Keberhasilan/ kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian 23 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020.

Dari 29 indikator kinerja utama, sebanyak 8 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori sangat baik, 8 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori baik dan 4 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori cukup, 2 indikator kinerja mencapai keberhasilan dengan kategori baik dan 7 indikator kinerja mencapai keberhasilan dengan kategori kurang baik.

Sasaran strategis "**Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat**" yang diukur oleh indikator kinerja **Angka Kriminalitas** berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 175%. Akan tetapi, sasaran strategis "Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN" yang diukur oleh indikator kinerja Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline* dan Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK berhasil dengan capaian kinerja terendah sebesar 0%.

Adapun rincian pencapaian misi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

MISI 1: MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT).

Untuk pencapaian misi 1 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan yaitu "Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan". Tujuan misi 1 memiliki 3 sasaran yang diukur dengan 3 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Daerah	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100	89.24%	89.24%
		Meningkatkan Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan	Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat (corporate social responsibility, manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	5	2.63%	52.6 %
		Melibatkan pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	100	0	0 %
Rata-rata Capaian Indikator Misi 1						47.28%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja utama adalah 47.28%, termasuk kategori keberhasilan kurang baik.

MISI 2: MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN.

Untuk pencapaian misi 2 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 6 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Nilai EKPPD	A 3.365	BB 3.2293	95 % 96.08 %
		Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100 %

		Daerah		
	Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK	1	0	0 %
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	80	81.70	103.58%
Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	13.7	8.33	60.78 %
Rata-rata Capaian Indikator Misi 2				75.9%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 75.9%, termasuk kategori keberhasilan baik.

MISI 3: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Untuk pencapaian misi 3 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 2 tujuan yaitu “Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Penataan Ruang Kota”. Tujuan tersebut memiliki 8 sasaran strategis yang diukur dengan 10 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Peningkatan Kualitas Jalan	Indeks Jalan Mantap	100	89	89 %
		Peningkatan Kualitas Air Minum	Indeks Air Minum Layak	95	88.68	93.34 %
		Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Indeks Akses Sanitasi Layak	100	82,17	82,17%
			Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	99.80	97.43	97.62 %
		Peningkatan Kepemilikan Rumah	Indeks Kepemilikan Rumah	71.56	34.4	48.07 %
		Meningkatnya Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air	83.98	47.33	56.47 %
	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	88.37	83.54	94.53 %	

Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67.46	37.11	55.01 %
Peningkatan Pelayanan Transportasi	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80	86.03	107.53 %
	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	160	59	134.7 %
Rata-rata Capaian Indikator Misi 3				85.83%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 10 indikator kinerja utama adalah 85.84%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

MISI 4: MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA.

Untuk pencapaian misi 4 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas dan Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran”. Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 4 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	3,31	-31,084	-9.30%
		Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6,30	-2,6	-41.26 %
		Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9,57	-2.9	-30,3 %
4.2	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	3.35	4.45	67.17 %
Rata-rata Capaian Indikator Misi 4						-3.41%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 4 indikator kinerja utama adalah -3.41%, termasuk kategori keberhasilan kurang baik.

MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT.

Untuk pencapaian misi 5 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 3 tujuan yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”. Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 6 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	14.9 Tahun	14.95 Tahun	100.06%
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,32	11,32	100%
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.52	74.38	99.81 %
			Indek Pemberdayaan Gender	73.84	60.99	82.59 %
		Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas	Indeks Ramah Disabilitas	75	85.16	119.94 %
			Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	435	109
Rata-rata Capaian Indikator Misi 5						112.98%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 112.98%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	VIII

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2. Pemerintahan Kota Bukittinggi	2
1.3. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bukittinggi	5
1.4 Gambaran Umum Daerah	5
A. Geografi Kota Bukittinggi	5
B. Kependudukan	7
1.5. Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi	9
1.6. Dasar Hukum	22
1.7. Maksud Dan Tujuan	23
1.8. Sistematika Penulisan	23

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Dan Misi	26
Visi	26
Misi	26
Perencanaan Kinerja	27
2.2. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	30
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	31
3.3. Analisis Capaian Kinerja	33
Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	34
Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	36
Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang telah Menyediakan Layanan Pengaduan Masyarakat Baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	40
Nilai SAKIP	41
Nilai EKPPD.....	44
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	47
Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK	50
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	52
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	55
Indeks Jalan Mantap	58
Indeks Air Minum Layak	61
Indeks Akses Sanitasi Layak	63
Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	65
Indeks Kepemilikan Rumah	67
Indeks Kualitas Air	69

Indeks Kualitas Udara	71
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	73
Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	75
Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	76
Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	79
Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	80
Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	82
Tingkat Kemiskinan.....	84
Harapan Lama Sekolah	87
Angka rata-rata Lama Sekolah	90
Usia Harapan Hidup	92
Indek Pemberdayaan Gender	94
Indeks Ramah Disabilitas	101
Angka Kriminalitas	104
3.4 Realisasi Anggaran	106
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	107
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	108

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	30
Tabel III.2 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020	31
Tabel 1.1.1 Persentase Program/ kegiatan pada Belanja Langsung Yang Telah Melalui Proses Perencanaan Partisipatif	34
Tabel 1.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Program/ Kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui Proses Perencanaan Partisipatif 3 (Tiga) Tahun Terakhir	35
Tabel 1.5. Program/kegiatan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	36
Tabel 2.1 Capaian Indikator Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	36
Tabel 2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	37
Tabel 2.5. Kegiatan Pembangunan Yang Dibiayai Dana CSR Tahun 2020	39
Tabel 2.6. Program/Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR.....	39
Tabel 3.1 Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	40
Tabel 3.2 Perbandingan antara Capaian 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	40
Tabel 4.1. Capaian Indikator Nilai SAKIP	41
Tabel 4.1.1 Tabel Komponen Penilaian SAKIP.....	41
Tabel 4.2. Perbandingan antara Nilai SAKIP 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	42
Tabel 5.1 Capaian Indikator Nilai EKPPD.....	44
Tabel 5.2 Perbandingan antara Nilai EKPPD dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	45
Tabel 5.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator.....	47
Tabel 6.1 Capaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.....	47
Tabel 6.2 Perbandingan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 3 (Tiga) Tahun Terakhir	48
Tabel 7.1 Capaian Indikator Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK.....	50
Tabel 7.2 Perbandingan antara Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK 3 (Tiga) Tahun Terakhir	50
Tabel 8.1. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	52
Tabel 8.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 3 (Tiga) Tahun Terakhir	53
Tabel 9.1 Capaian Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	55
Tabel 9.2 Perbandingan antara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 3 (Tiga) Tahun Terakhir	55

Tabel 9.6. Program dan Kegiatan Peningkatan Penerimaan PAD	57
Tabel 10.1 Capaian Indikator Indeks Jalan Mantap	58
Tabel 10.2 Perbandingan Indeks Jalan Mantap Tahun 2020 3 (Tiga) Tahun Terakhir	59
Tabel 10.2.1 Kondisi Jalan Kota Bukittinggi	59
Tabel 10.6. Program/ Kegiatan Indeks Jalan Mantap	60
Tabel 11.1. Capaian Indikator Indeks Air Minum Layak Tahun 2020	61
Tabel 11.2 Perbandingan antara Indeks Air Minum Layak 3 (Tiga) Tahun Terakhir	61
Tabel 12.1. Capaian Indikator Indeks Akses Sanitasi Layak	63
Tabel 12.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Akses Sanitasi Layak 3 Tahun Terakhir	64
Tabel 13.1. Capaian Indikator Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	65
Tabel 13.2. Perbandingan Capaian Kinerja antara Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan Tahun 2020 3 (Tiga) Tahun Terakhir	65
Tabel 14.1. Capaian Indikator Indeks Kepemilikan Rumah	66
Tabel 14.2. Perbandingan antara Indeks Kepemilikan Rumah 3 (Tiga) Tahun Terakhir	67
Tabel 15.1. Capaian Indikator Indeks Kualitas Air	69
Tabel 15.2. Perbandingan antara Indeks Kualitas Air 3 (Tiga) Tahun Terakhir	69
Tabel 16.1. Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara	70
Tabel 16.1.1 Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Udara	71
Tabel 16.2 Perbandingan antara Indeks Kualitas Udara 3 (Tiga) Tahun Terakhir	71
Tabel 16.6. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Indeks Kualitas Udara	72
Tabel 17.1. Capaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan	73
Tabel 17.2 Perbandingan antara Indeks Kualitas Tutupan Lahan 3 (Tiga) Tahun Terakhir	73
Tabel 17.5. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74
Tabel 18.1. Capaian Indikator Kinerja Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	74
Tabel 18.2 Perbandingan antara Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan 3 (Tiga) Tahun Terakhir	75
Tabel 18.6. Program/ kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator	76
Tabel 19.1. Capaian Indikator Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	77
Tabel 19.2 Perbandingan antara Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 3 (Tiga) Tahun Terakhir	77
Tabel 19.2.1. Jumlah Kejadian Kecelakaan Di Kota Bukittinggi	77

Tabel 19.6. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	79
Tabel 20.1. Tabel Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	80
Tabel 20.2 Perbandingan antara Pertumbuhan PDRB Sektor Primer 3 (Tiga) Tahun Terakhir	80
Tabel 20.6. Program/Kegiatan Penunjang Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	81
Tabel 21.1. Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	81
Tabel 21.2 Perbandingan antara Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	82
Tabel 21.6 Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder.....	82
Tabel 22.1. Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	83
Tabel 22.2 Perbandingan antara Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	83
Tabel 22.6. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier ...	84
Tabel 23.1. Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan	85
Tabel 23.2 Perbandingan antara Tingkat Kemiskinan 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	86
Tabel 24.1 Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah	88
Tabel 24.2 Perbandingan antara Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	89
Tabel 25.1. Capaian Indikator Angka rata-rata Lama Sekolah	91
Tabel 25.2 Perbandingan antara Angka Rata Rata Lama Sekolah 3 (Tiga) Tahun Terakhir	91
Tabel 26.1 Capaian Indikator Usia Harapan Hidup	93
Tabel 26.2. Perbandingan antara Usia Harapan Hidup 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	93
Tabel 27.1 Capaian Indikator Indek Pemberdayaan Gender.....	95
Tabel 27.2 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender 3 (Tiga) Tahun Terakhir	97
Tabel 27.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Indek Pemberdayaan Gender	101
Tabel 28.1 Capaian Indikator Indeks Ramah Disabilitas	101
Tabel 28.2 Perbandingan antara Indeks Ramah Disabilitas 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	102
Tabel 28.5. Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Indeks Ramah Disabilitas.....	103
Tabel 29.1. Capaian Indikator Angka Kriminalitas.....	104
Tabel 29.2 Perbandingan antara Angka Kriminalitas 3 (Tiga) Tahun Terakhir	105
Tabel 29.6 Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Angka Kriminalitas	106
Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran.....	107



BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja juga menjadi perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP telah mendorong percepatan perwujudan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sistem manajemen pemerintahan, sebagai agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan melalui Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem pemerintahan yang baik. Untuk itu, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus disusun dengan baik secara teknis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai acuan dari implementasi kebijakan nasional dan daerah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk laporan tahun kelima RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, siap untuk disajikan. Keberadaan LKIP ini akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Bukittinggi dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.



I.2. PEMERINTAHAN KOTA BUKITINGGI

Guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Implementasi peraturan tersebut mendasari pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan,
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat,
 - 3) Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan,
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat,
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Umum dan Perlengkapan,
 - 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan,
 - 3) Bagian Organisasi.
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh Inspektur;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Badan;
6. Badan Keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
8. Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas;
11. Dinas Sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas;
12. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh Kepala Satuan;
13. Dinas Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Dinas;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas;
15. Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas;
17. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas;

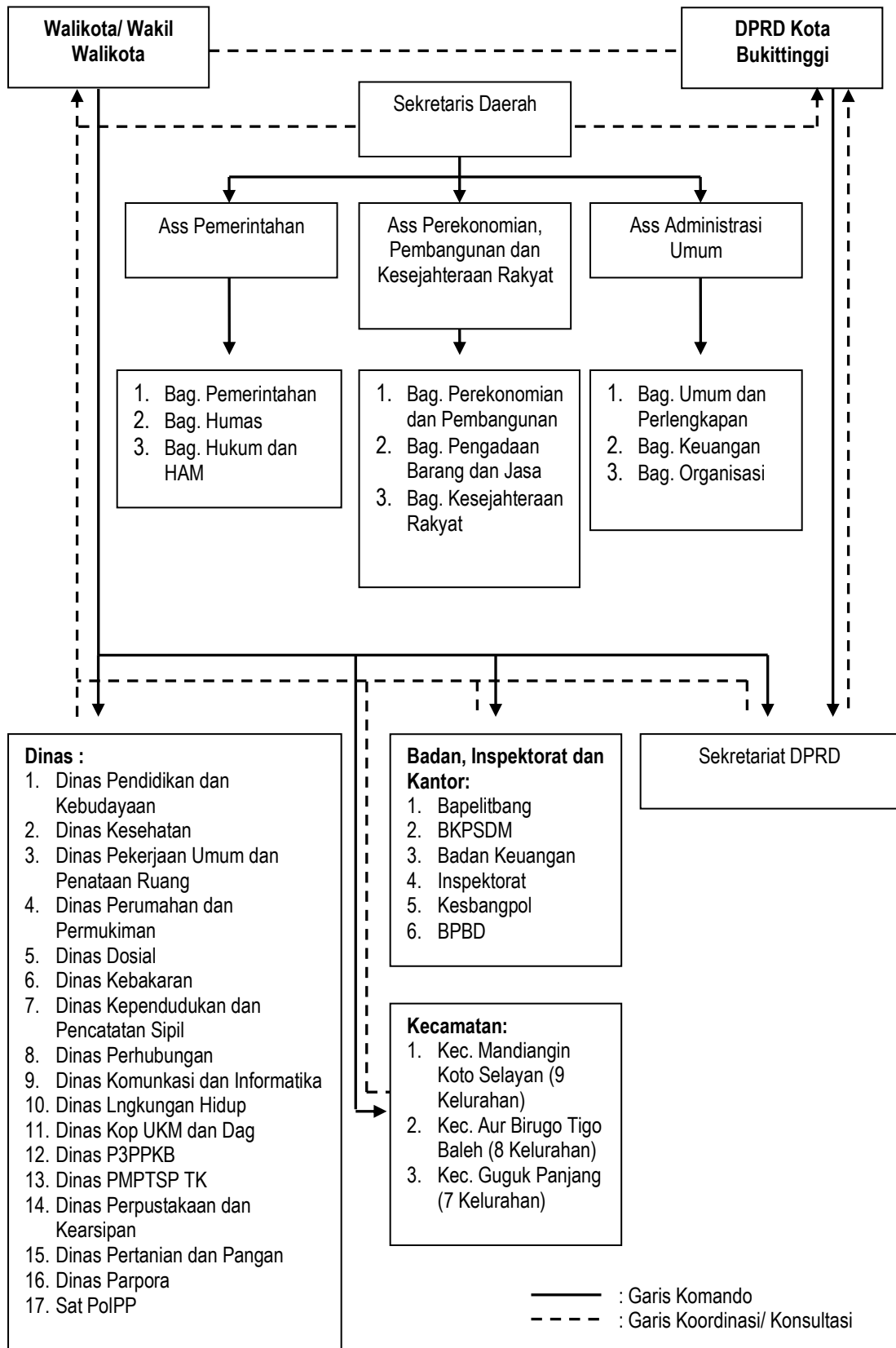


18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipimpin oleh Kepala Dinas;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
22. Dinas Pertanian dan Pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
23. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas;
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Kantor;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana;
26. Kecamatan, dipimpin oleh Camat, terdiri dari 3 Kecamatan:
 - (a) Kecamatan Guguk Panjang membawahi 7 Kelurahan,
 - (b) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh membawahi 8 Kelurahan,
 - (c) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, membawahi 9 Kelurahan.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Bukittinggi selanjutnya dapat dilihat pada Bagan Struktur sebagaimana tercantum pada bagan berikut ini :



Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bukittinggi



Sumber Data: Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016

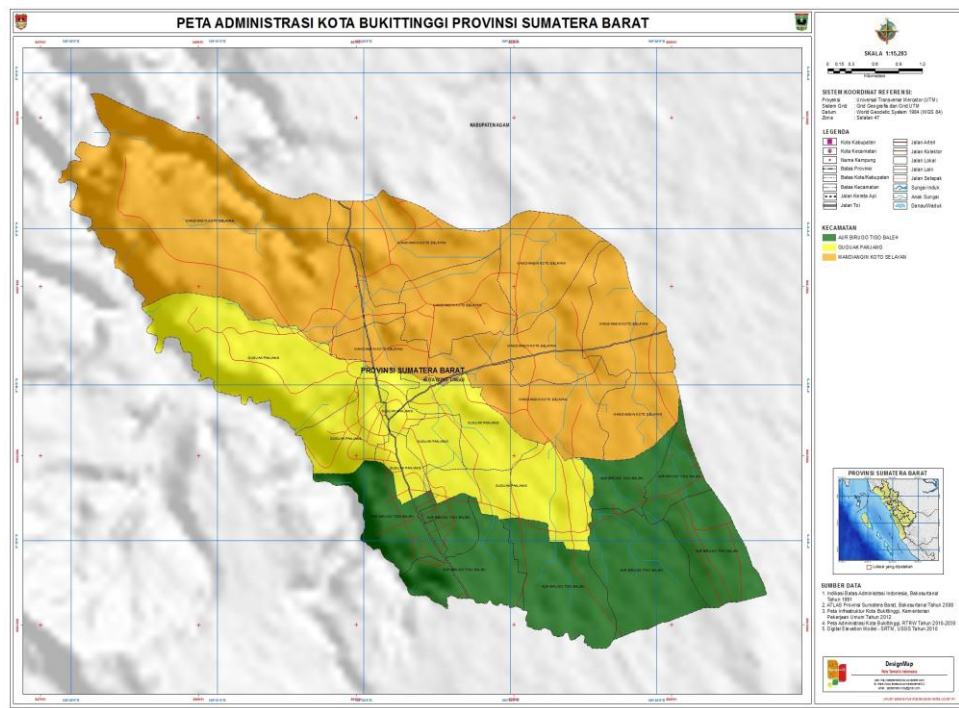
I.3. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOTA BUKITTINGGI

Dalam perkembangannya, secara administratif Kota Bukittinggi terbentuk atas Dasar Hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok pokok Pemerintahan Dearah jo Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah;
- 3) Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958, Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1966 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Nomor 391 Tanggal 9 Juni 1947 Tentang Pembentukan Kota Bukittinggi Sebagai Kota Yang Berhak Mengatur Dirinya Sendiri.

I.4. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Geografi Kota Bukittinggi



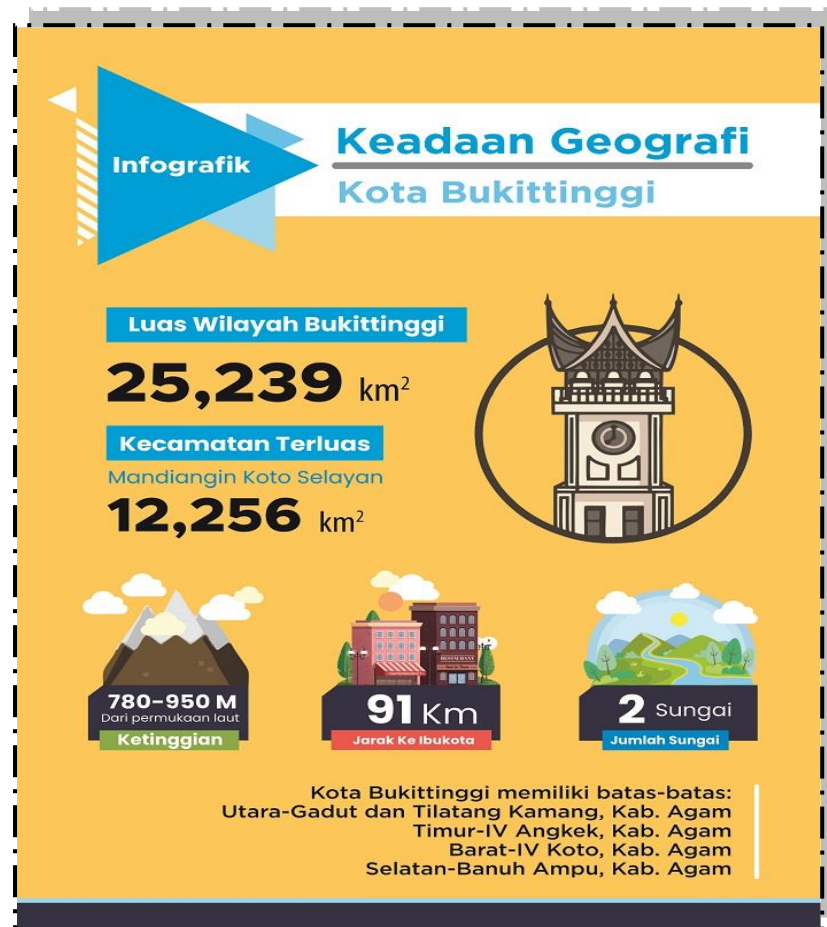
Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter diatas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan Ibukota provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km.

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Tabel I.4. A Luas Kota Bukittinggi dan Kecamatan di Kota Bukittinggi

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27	100°, 22' 49" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiingin Koto Selayan	9	12.156	48	100°, 22' 23" BT 0°, 17' 28" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	25	100°, 23' 22" BT 0°, 19' 16" LS
Bukittinggi	24	25.239	100.00	100°, 22' 03" BT 0°, 17' 08" LS

Sumber Data: BPS 2019





B. Kependudukan

Secara administratif pemerintahan Kota Bukittinggi terbagi atas 3 kecamatan dan 24 kelurahan dengan sebaran Rukun Tetangga dan Rukun Warga Aktif yang terdiri dari:

Tabel I.4.B. Jumlah RT dan RW di Kota Bukittinggi

Kecamatan dan Kelurahan	Rukun Tetangga	Rukun Warga
1	2	3
Guguk Panjang	108	33
Bukik Cangang Kayu Ramang	10	5
Tarok Dipo	25	6
Pakai Kurai	17	6
Aur tajungkang Tengah Sawah	19	5
Benteng Pasar Atas	9	3
Kayu Kubu	13	3
Bukit Apit Puhun	15	5
Mandiingin Koto Selayan	137	36
Pulai Anak Aia	13	5
Koto Selayan	6	3
Garegeh	7	2
Manggis Ganting	10	4
Campago Ipuh	21	4
Puhun Tembok	18	6
Puhun Pintu Kabun	14	4
Kubu Gulai Bancah	18	2
Campago Guguk Bulek	30	6
Aur Birugo Tigo baleh	92	37
Belakang Balok	12	4
Sapiran	11	6
Birugo	18	6
Aur Kuning	13	4
Pakan Labuh	14	7
Kubu Tanjung	8	4
Ladang Cakiah	8	2
Parit Antang	8	4

Sumber Data: BPS 2019

Berikut perbandingan jumlah penduduk Kota Bukittinggi dengan jumlah penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat, menurut Kabupaten/Kota dan jenis kelamin tahun 2020

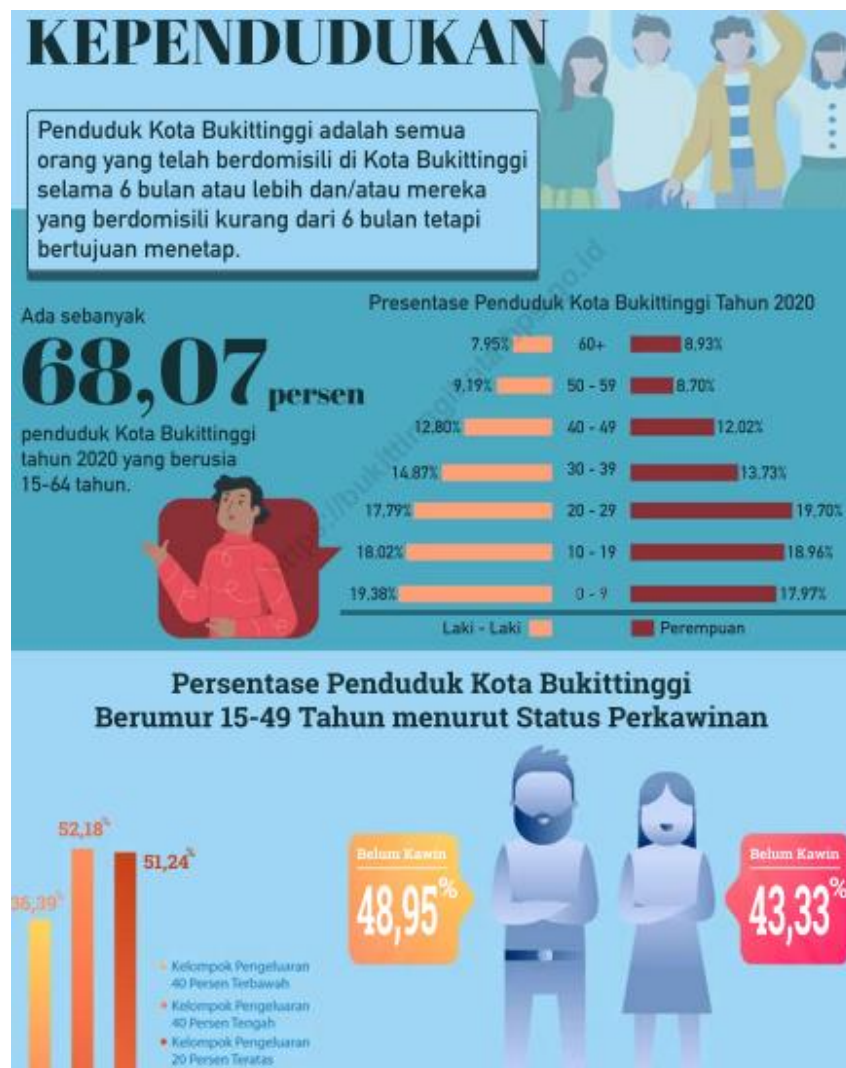
Tabel I.4.B.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Kab/ Kota Se Sumatera Barat

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Kepulauan Mentawai	45.477	42.146	87.623
Pesisir Selatan	253.854	250.564	504.418
Kab. Solok	196.899	194.598	391.497



Sijunjung	119.126	115.919	235.045
Tanah datar	186.134	185.570	371.704
Padang Pariaman	215.038	215.588	430.626
Agam	266.848	262.290	529.138
Lima Puluh Kota	191.736	191.789	383.525
Pasaman	150.798	149.053	299.851
Solok Selatan	92.859	89.168	182.027
Dharmasraya	116.310	112.281	228.591
Pasaman Barat	218.573	213.099	431.672
Padang	456.329	452.711	909.040
Kota Solok	36.990	36.448	73.438
Sawahlunto	32.767	32.371	65.138
Padang Panjang	28.286	28.025	65.311
Bukittinggi	60.515	60.513	121.028
Payakumbuh	70.250	69.326	139.576
Pariaman	47.571	46.653	94.224
Sumatera Barat	2.786.360	2.748.112	5.534.472

Sumber : BPS Sumatera Barat 2021



Sumber: BPS Kota Bukittinggi (Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020)



I.5. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk itu, isu-isu strategis akan dianalisa dengan berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Khusus tahun 2020, meskipun tidak diidentifikasi selama masa RPJMD 2016-2021 namun terdapat isu yang harus diangkat pada Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020 ini. Isu yang terjadi tersebut adalah tentang Pandemi Covid 19 yang merebak diseluruh dunia dan tak terkecuali Indonesia. Tentunya Kota Bukittinggi juga tidak bisa terhindar dari pandemi ini. Terjadi pandemi Covid 19 ini telah menyebabkan korban yang sangat banyak bahkan hampir 1 juta masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi positif, untuk Provinsi Sumatera Barat per tanggal 29 Januari 2021, sementara untuk Kota Bukittinggi 929 kasus terkonfirmasi positif dan 18 orang meninggal hingga akhir tahun 2020. Pandemi ini juga membawa dampak yang sangat besar pada semua aspek-aspek kehidupan. Oleh karena itu sudah selayaknya Isu tentang pandemi Covid 19 ini menjadi hal yang perlu dibahas pada bagian tersendiri.

Berikut diuraikan isu-isu strategis pembangunan Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

I.5.1 Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemahaman agama dan budaya untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat kota menjadi isu strategis yang sangat penting dimasa mendatang. Sebab meskipun selama ini



kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun dalam implementasinya terlihat belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat.

Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamis sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan

gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negatif yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai*. Falsafah ini telah mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat Minangkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

I.5.2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.



Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance* dan *clean government*. Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun etika, sikap dan perilaku.

Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalitas aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam kurun periode 5 tahun.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebaik apapun sistem yang dibuat, kalau sumber daya manusianya tidak memadai, tetap saja akan menjadi kendala besar. *Input* terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcomes*. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda pemerintahan yang tentu saja akan berdampak besar terhadap pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan terpercaya, yaitu:

- a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi,
- c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik,
- d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),
- e. Perlunya semua stakeholder untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat,
- f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan

software. *Hardware* berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah *brainware* berupa sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan



kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersama pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Disinilah

pentingnya *reinventing government* dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi fokus untuk dioptimalkan.

I.5.3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain.

Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan kota kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur kereta api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang murah dan representatif. Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Disamping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep *smart city*. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.



I.5.4. Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep *green city* juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

I.5.5. Pelaksanaan MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan pada akhir Desember 2015, dimana ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Kota Bukittinggi secara cermat dan terintegrasi. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah akan menjadi aset berharga bagi Daerah untuk meraih keberhasilan dalam memperoleh manfaat dari MEA bagi kepentingan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA 2015 dan meningkatkan peran aktif kalangan dunia usaha



dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi MEA. Terkait dengan pelaksanaan MEA tersebut, perlu adanya peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi kepentingan pembangunan di daerah.

Beberapa upaya yang mesti dilakukan daerah untuk mengambil manfaat dalam pelaksanaan MEA tersebut adalah: peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UMKM di daerah. Peningkatan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA melalui: peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan di daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peningkatan daya saing perekonomian daerah perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk

meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa keluar masuk Kota Bukittinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja di daerah agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi perizinan yang menghambat investasi sehingga terjadi peningkatan investasi masuk ke Daerah antara lain dengan pengembangan sistem inovasi daerah dan penerapan inovasi pelayanan publik.

I.5.6. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Hal yang dilakukan untuk mencapai target kinerja pemerintah di bidang pendidikan adalah dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara



berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah. Oleh karena itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencapaian 8 (delapan) standar mutu pendidikan.

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. Ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

I.5.7. Pembangunan Kependudukan

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 oleh BPS, jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 jiwa terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki – laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75%. Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.



Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 - 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 sampai ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat kompleks. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2019, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.

Grand Desain Kependudukan yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Grand Desain Kependudukan tahun 2010 s/d 2035 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan di Kota Bukittinggi, sehingga pembangunan Kota Bukittinggi belum kuat berwawasan kependudukan. Grand Design Kependudukan telah merinci 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan pembangunan data base Kependudukan. Laju Pertumbuhan Penduduk masih di strata 1,77, yang disebabkan faktor urbanisasi sebagai akibat atau eksekusi dari Bukittinggi sebagai kota wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan.

Urbanisasi berasal dari masyarakat *hinterland* atau masyarakat di sekitar kota Bukittinggi seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman bahkan dari Sumatera Utara dan Riau semakin hari semakin besar, dan nyaris tidak terkendali. Akibat tidak adanya strategi pengembangan ekonomi yang mampu memproteksi atau mengurangi pendatang. Rata-rata Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 4.774 jiwa/km², dan untuk Kecamatan Guguk Panjang kepadatan penduduk telah mencapai 6.601 Jiwa / Km². Meningkatnya indeks harapan hidup tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang membuat seorang lansia tangguh dan memiliki nilai manfaat. Apabila ini tidak menjadi konsentrasi Pemko Bukittinggi, ini justru akan menjadi beban baru.

Bonus Demografi tahun 2028, mengharuskan ketepatan kebijakan dan program, agar bonus demografi benar – benar dapat dicapai. Tinggi pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan kepada penanggulangan kemiskinan karena pertumbuhan penduduk tidak menjadi prioritas program. Garapan program KB terhadap Pasangan Usia Subur sebenarnya sudah baik



yaitu 69,16%, namun karena laju pertumbuhan penduduk dari faktor urbanisasi strata PUS sangat tinggi ke Bukittinggi, membuat kinerja garapan program KB ke PUS terkesan stagnasi, sehingga benar benar diperlukan strategi arus masuk penduduk ke Kota Bukittinggi yang lebih berpihak kepada program kependudukan, Karena tanpa adanya regulasi yang jelas, maka LPP Kota Bukittinggi sulit diturunkan. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15-49 tahun, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid (datang bulan), juga termasuk istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

I.5.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke daerah yang meliputi Pengarusutamaan gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan anak, Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik berupa pelatihan, sosialisasi, pembinaan yang ditujukan bagi kaum perempuan dan anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dan penanggulangan masalah KDRT. Walaupun semua pengaduan dapat ditanggulangi dengan baik namun tidak semua kasus yang ada di masyarakat terpantau dengan baik, karena tidak dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, masih perlu



ditingkatkan. Masih tingginya tindakan KDRT, menunjukkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan belum kuat.

Partisipasi perempuan di Kota Bukittinggi dapat dilihat di segala bidang kehidupan, baik politik dan lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga eksekutif, yudikatif maupun organisasi kemasyarakatan lainnya bahkan menjadi pelaku ekonomi. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik tidak cukup diimbangi dengan meningkatnya jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan perempuan pada sektor publik di Kota Bukittinggi, khususnya Pegawai Negeri Sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah 1.619 orang atau 62,63% dari jumlah seluruh ASN yang ada, yaitu sebesar 2.585 orang pegawai.

Dilihat dari perbandingan perempuan bekerja di lembaga pemerintah dengan pegawai

yang ada, sudah memperlihatkan angka yang sangat baik, bahkan melampaui batas amanah UU yaitu 30%. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (umur 20 sampai 60 tahun) yang berjumlah sebesar 29.341 jiwa, persentase perempuan yang bekerja pada pemerintah hanya mencapai 7,6%, disatu pihak amanat Uhdang - Uhdang, mengamatkan kuota perempuan sebesar 30 %, kondisi ini harus diakui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, artinya program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan masih perlu menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

Selanjutnya dalam pemenuhan hak anak yakni 5 klaster hak anak (KHA) dengan 31 indikator telah dibuat gugus tugas Kota Layak anak (KLA). Untuk perlindungan dari kekerasan juga telah dibuat gugus tugas GN-AKSA dan P2TP2A. Bahkan saat ini Bukittinggi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak. Hal ini tentu sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk urusan Perempuan dan Anak.

I.5.9. Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Sejalan dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai sebuah kesepakatan pembangunan global oleh lebih dari 193 kepala negara yang tergabung didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global yang turut disukseskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Pernerlakuan SDGs selama 15 tahun tersebut (berlaku sejak 2016 hingga



2030), menghendaki Pemerintah Kota Bukittinggi turut terlibat aktif mensukseskannya dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan Kota Bukittinggi.

SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Peluang besar bagi Kota Bukittinggi untuk mensukseskannya dengan kontribusi yang dibangun secara partisipatif. Kontribusi dan partisipasi sendirinya akan mendorong keadilan prosedural dan keadilan substansial terhadap kebijakan dan program pembangunan hingga mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

I.5.10. Fenomena Globalisasi Pandemi Covid-19

Sebagaimana kini ketahui bahwa Tahun 2020 seperti halnya sebagian besar Negara di dunia merupakan tahun terberat bagi negeri ini. Hampir disepanjang tahun 2020 mulai sekitar Bulan Maret hingga Desember, negeri ini tak pelik dihadapkan dengan fenomena penyebaran virus Covid-19 yang mewabah. Tak satupun daerah di Indonesia yang lepas dari persoalan ini, **termasuk Kota Bukittinggi**. Upaya cepat dan tanggap langsung dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi melalui arahan dan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Walikota se-Sumbar, kiranya perlu diambil langkah-langkah cepat, tepat dan terukur dalam penanganan wabah tersebut.

Meskipun di Bukittinggi hingga bulan April 2020 belum ditemui pasien yang positif terjangkit virus Corona, namun unsur Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi telah mengambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di kota Bukittinggi. Gugus Tugas penanganan dibentuk dengan melibatkan seluruh unsur Pemerintahan Daerah ditambah dengan melibatkan rumah sakit-rumah sakit beserta tenaga medis di kota Bukittinggi. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah membentuk Posko Siaga 24 jam yang berlokasi di kantor Dinas Kesehatan.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), juga dilakukan. Dimulai sejak 21 April 2020, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bukittinggi lakukan sosialisasi Pemberlakuan PSBB di seluruh wilayah dengan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Barat, nomor: 180-297-2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi

Sumatera Barat dalam rangka Percepatan Penanganan **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19). Pemberlakuan tersebut mulai tanggal 22 April s.d. 5 Mei 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Sumatera Barat dan/atau jika masih terdapat bukti penyebaran.

Pengawasan terhadap mobilitas orang dan barang ke dalam ataupun ke luar Bukittinggi dilakukan dengan pemeriksaan pada posko yang telah ditentukan. Posko dipusatkan pada lokasi akses masuk dan keluar Kota Bukittinggi. Selama pemberlakuan PSBB tidak dilakukan penutupan pasar, kedai/ warung, toko dan tempat-tempat aktivitas ekonomi lainnya. Namun dilakukan pembatasan-pembatasan terkait aktivitas dari jam 5 (pagi) sampai jam 4 (sore). Kedai makanan/ kafe tidak diperkenankan untuk melayani makan di tempat dan agar tetap menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*).

Pandemic Covid 19 memberi dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tak terkecuali Kota Bukittinggi. Dampak yang ditimbulkan menyentuh kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Disinilah dituntut peran besar Pemerintah dengan merangkul pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan intervensi sehingga masyarakat mampu bertahan bahkan bangkit dari keterpurukan kehidupan akibat dampak pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Pemerintah daerah dituntut aktif untuk mengambil kebijakan yang bersifat cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Pemerintah daerah perlu terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan Covid-19 dan menyesuaikan kebijakannya terhadap tantangan-tantangan baru.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah memainkan peran signifikan dalam memutuskan kebijakan yang paling tepat bagi Bukittinggi. Pemerintah Kotaterus berupaya untuk mengenali secara cermat masalah, memutuskan secara cepat kebijakan yang relevan, serta memastikan kebijakannya bekerja secara efektif. Pendek kata, pemerintah Kota Bukittinggi terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan Covid-19. Perbaikan-perbaikan kebijakan senantiasa dituntut setiap saat untuk menyesuaikan atas tantangan-tantangan baru yang hadir dalam proses.

I.5.11. Penguatan ekonomi Kota ditengah pandemi Covid-19

Dampak dari dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat virus Covid 19 sangat berdampak pada perekonomian global yang mengarah kepada keterpurukan. ILO (*International Labor Organization*) memprediksi jumlah pemutusan hak kerja pada triwulan II 2020 akibat pandemi Covid-19 mencapai 195 juta orang.



Berdasarkan data Bappenas akibat pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,8%-8,5%. Tingkat kemiskinan di 2020 berada dikisaran 9,2% - 10,2%. Jumlah pengangguran di 2020 mencapai 4,22 juta orang dan jumlah penduduk miskin bertambah 2 juta orang.

Demikian halnya dengan Kota Bukittinggi yang sangat menggantungkan perekonomian kota pada sektor pariwisata sangat merasakan imbas pandemi Covid-19. Geliat sektor Pariwisata Kota Bukittinggi yang selama ini memberikan efek besar terhadap sektor perekonomian kota semisal perdagangan dan jasa terus mengalami kelesuan. Pembatasan terhadap pergerakan serta mobilitas orang dan barang membuat sektor pariwisata Kota Bukittinggi tidak dapat berbuat apa-apa. Jumlah kunjungan wisatawan berada pada angka terendah, tingkat hunian dengan angka serupa serta pusat-pusat tujuan wisata yang setiap harinya nyaris tanpa ada aktifitas. Ekonomi semakin memburuk. Merupakan sektor terparah dampak pandemi Covid-19 karena banyak PHK, penutupan dan penghentian usaha dan produksi. Sektor terkait pariwisata di antaranya adalah: transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi (hotel/penginapan), Makan minum (restoran dan rumah makan), Jasa lainnya (seperti hiburan dan rekreasi). Sementara sektor Pertanian yang menyumbang PDRB terbanyak sekitar 22% dan menyerap tenaga kerja lebih 50% juga berpengaruh akibat Covid tapi masih dianggap survive.

Dalam rangka memulihkan ekonomi, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, atas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 berupaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. Hal tersebut dimaksud sebagai upaya kongkrit bertitik tolak dari kondisi global maupun nasional saat ini yang tengah menghadapi pandemi Covid-19. Dalam rancangan KUA Tahun Anggaran 2021 prioritas pembangunan diarahkan pada pemulihan ekonomi dampak Covid-19, pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur terutama terkait pengendalian banjir dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum dan peningkatan tata kelola pemerintah.

Secara aktif Pemerintah Kota Bukittinggi konsern memberikan bantuan sembako dan pangan kepada masyarakat. Bantuan diberikan dengan nilai Rp 150.000/ KK/ bulan untuk bulan Januari dan Februari dan untuk bulan Maret hingga Agustus nilai bantuan yang diberikan naik menjadi Rp 200.000/ KK/ bulan. Selain itu bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberikan juga untuk 19.206 jiwa se-Kota Bukittinggi dengan total nilai Rp 9 milyar lebih. Bersamaan dengan itu juga diserahkan bantuan tas sekolah bagi 726 siswa dari keluarga miskin.

Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa memprioritaskan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi warga dan pengentasan kemiskinan. bentuk



konkritnya adalah melalui program yang dilaksanakan Dinas Sosial, seperti program sembako, PKH dan program-program lainnya. Program-program dimaksud tidak semata berupa pemberian bantuan dalam bentuk dana tunai, namun juga berupa pembinaan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE).

I.6. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini didasarkan kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
- 12) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021;



- 13) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi;
- 14) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020;
- 15) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- 16) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

I.7. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan evaluasi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan LKIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kota. Akhirnya penyusunan LKIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

I.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bukittinggi. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Bab I *Pendahuluan*

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut:

I.1. Latar Belakang

Berisikan latar belakang penyusunan LKIP SKPD Tahun 2019.



I.2. Pemerintah Kota Bukittinggi

Berisikan tentang struktur pemerintahan Kota Bukittinggi

I.3. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bukittinggi

Berisikan tentang dasar hukum pembentukan Kota Bukittinggi

I.4. Gambaran Umum Daerah

Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi beserta struktur organisasi SKPD.

I.5. Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi

Penjelasan mengenai isu-isu/ permasalahan-permasalahan strategis yang sedang dihadapi SKPD.

I.6. Dasar Hukum

Berisikan tentang dasar hukum penulisan LAKIP Kota Bukittinggi Tahun 2020

I.7. Maksud dan Tujuan

Berisikan tentang maksud dan tujuan penulisan

I.8. Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai sistematika penulisan LKIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan sebagai berikut:

II.1. Rencana Strategis SKPD

Berisikan penjelasan mengenai rencana strategis SKPD yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama tahun 2016-2021.

II.2. Perjanjian Kinerja

Penjelasan mengenai Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Menguraikan metodologi pengukuran penghitungan capaian target kinerja.

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Menjelaskan mengenai hasil pengukuran

III.3. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



1. Perbandingan antara target kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Tahun 2020;
2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019);
3. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Program/ kegiatan penunjang capaian indikator.

III.4. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

IV.1. Kesimpulan

Diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja SKPD.

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Penjelasan mengenai strategi/langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja SKPD.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, dinyatakan bahwa visi Kota Bukittinggi adalah:

Makna yang terkandung dari visi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat,
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi,
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya,
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi,
5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha,
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradab dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

VISI

**“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan
Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan,
Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan
Nilai Agama Dan Budaya”**

2.1.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Kota Bukittinggi guna mendukung pembangunan daerah melalui pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut :



MSI

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat),
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan,
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan,
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna,
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

2.1.3. PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2020 merupakan tahun kelima implementasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, yang penyusunannya dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020, dimana pada waktu penyusunan awalnya masih memperhatikan RKPD yang ada. Ditetapkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, dilakukan penyempurnaan perencanaan tahunan dimaksud, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya,
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan,
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
5. Pengembangan Pariwisata, Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah),
6. Penanggulangan Kemiskinan,
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur,
8. Pelestarian lingkungan hidup.

2.2. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6
1	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	%	100
2	Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	2	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , <i>manunggal</i> dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	%	5
3	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik online maupun offline	%	100
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4	Nilai SAKIP	Peringkat	A
		5	Nilai EKPPD	Nilai	3.365
5	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP
		7	Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK	Jumlah	1
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	Nilai	80
7	Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	9	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	13.7
8	Peningkatan Kualitas Jalan	10	Indeks Jalan Mantap	%	100
9	Peningkatan Kualitas Air Minum	11	Indeks Air Minum Layak	%	95



10	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	12	Indeks Akses Sanitasi Layak	%	100
		13	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	%	99.80
11	Peningkatan Kepemilikan Rumah	14	Indeks Kepemilikan Rumah	%	71.56
12	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	15	Indeks Kualitas Air	Nilai	83.98
13	Meningkatnya Kualitas Udara	16	Indeks Kualitas Udara	Nilai	88.37
14	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	67.46
15	Peningkatan Pelayanan Transportasi	18	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	%	80
		19	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Jumlah	170
16	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer	20	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	Nilai	3.31
17	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder	21	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	Nilai	6.30
18	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier	22	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	Nilai	9.57
19	Penurunan Kemiskinan	23	Tingkat Kemiskinan	%	3.35
20	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	24	Harapan Lama Sekolah	Angka	14.9
		25	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Angka	11.33
21	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	26	Usia Harapan Hidup	Angka	74.52
22	Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas	27	Indek Pemberdayaan Gender	Nilai	74.84
		28	Indeks Ramah Disabilitas	Nilai	71
23	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29	Angka Kriminalitas	Jumlah	435

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan Perwujudan dari kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 23 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja.

III.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi serta menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	> 100%	Memuaskan
2	85% - 99,9%	Sangat Baik
3	75% - 84,9%	Baik
4	55% - 74,9%	Cukup
5	<55%	Kurang Baik

Tabel III.1. Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020



III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 23 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100	89.24%	89.24%
2	Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	2	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	5	2.63%	52.6 %
3	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	100	0	0 %
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4	Nilai SAKIP	A	BB	95 %
		5	Nilai EKPPD	3.365	3.2293	96.08 %
5	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100 %
		7	Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK	1	-	0 %
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	80	81.70	103.58%
7	Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	9	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	13.7	8.33	60.78 %
8	Peningkatan Kualitas Jalan	10	Indeks Jalan Mantap	100	89	89 %
9	Peningkatan Kualitas Air Minum	11	Indeks Air Minum Layak	95	88.68	93.34 %



10	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	12	Indeks Akses Sanitasi Layak	100	82,17	82,17%
		13	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	99.80	97.43	97.62 %
11	Peningkatan Kepemilikan Rumah	14	Indeks Kepemilikan Rumah	71.56	34.4	48.07 %
12	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	15	Indeks Kualitas Air	83.98	47.33	56.47 %
13	Meningkatnya Kualitas Udara	16	Indeks Kualitas Udara	88.37	83.54	94.53 %
14	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67.46	37.11	55.01 %
15	Peningkatan Pelayanan Transportasi	18	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80	86.03	107.53 %
		19	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	160	59	134.7 %
16	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer	20	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	3.48	-31.084	-9.3 %
17	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder	21	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6.35	-2.6	-41.26 %
18	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier	22	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9.57	-2.9	-30.3 %
19	Penurunan Kemiskinan	23	Tingkat Kemiskinan	3.35	4.45	67.17 %
20	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	24	Harapan Lama Sekolah	14.9	14.95	100.06 %
		25	Angka Rata Rata Lama Sekolah	11.33	11.33	100 %
21	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	26	Usia Harapan Hidup	74.52	74.38	99.81 %
22	Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas	27	Indek Pemberdayaan Gender	73.84	60.99	82.59 %
		28	Indeks Ramah Disabilitas	75	85.16	119.94 %
23	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29	Angka Kriminalitas	435	109	175.5 %

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain rata-rata dari 29 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 23 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2020 sebesar **75.94%** sesuai dengan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan **Baik**.

Tabel III.2.1 Klasifikasi Prediket Indikator Kinerja Utama Sesuai Kategori Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	IKU
1	> 100%	Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> a. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik c. Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan d. Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan e. Harapan Lama Sekolah f. Angka Rata Rata Lama Sekolah g. Indeks Ramah Disabilitas h. Angka Kriminalitas
2	85% - 99,9%	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif b. Nilai SAKIP c. Nilai EKPPD d. Indeks Jalan Mantap e. Indeks Air Minum Layak f. Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan g. Indeks Kualitas Udara h. Usia Harapan Hidup
3	75% - 84,9%	Baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kualitas Air b. Indeks Pemberdayaan Gender
4	55% - 74,9%	Cukup	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah b. Indeks Kualitas Air c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan d. Tingkat Kemiskinan
5	<55%	Kurang Baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i>, manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) b. Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> c. Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK d. Indeks Kepemilikan Rumah e. Pertumbuhan PDRB Sektor Primer f. Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder g. Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier

III.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2020 pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja tiap-tiap sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut:

TUJUAN I : Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Daerah

SASARAN I.1 : Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif** yang secara defenisi operasional, adalah jumlah usulan pemangku kepentingan/ jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir pada RKPD. Dari data dan informasi yang didapat dari Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Kota Bukittinggi bahwa jumlah keseluruhan usulan pemangku kepentingan berjumlah 288 usulan, sementara jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam RKPD berjumlah 257 sehingga dapat dilihat melalui rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{jumlah usulan pemangku kepentingan} \times 100\%}{\text{jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir pada RKPD}} \\ &= \frac{257 \times 100\%}{288} \\ &= \mathbf{89.24\%} \end{aligned}$$

Tabel 1.1.1 Persentase Program/ kegiatan pada Belanja Langsung Yang Telah Melalui Proses Perencanaan Partisipatif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100 %	89.24 %	89.24%

Sumber : Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif yang dilaksanakan secara *Bottom Up* melalui Musrenbang dimulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Kota Bukittinggi dengan realisasi 89,24%. Dimana dari 288 usulan masyarakat dapat ditampung pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebanyak 257 usulan. Artinya sebagian besar sudah ditampung pada RKPD Tahun 2020.



Ket : Foto Pembukaan Musrenbang Kota Bukittinggi 2020

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 1.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Program/ Kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui Proses Perencanaan Partisipatif 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Program/ Kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui Proses Perencanaan Partisipatif		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	100	100 %	100 %
2018	100	100 %	100 %
2019	100	100 %	100 %
2020	100	89.24 %	89.24 %

Sumber : Bapelitbang 2021

Berdasarkan definisi operasional diatas maka dari table diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terlihat bahwa capaian kinerja program/ kegiatan pada belanja langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif adalah 100%. Dimana usulan masyarakat hasil Musrenbang maupun yang bersifat Pokok-pokok pikiran DPRD ditampung semuanya pada RKPD.

Total usulan masyarakat yang ditampung pada RKPD Tahun 2020 adalah sebanyak 257 usulan, sedangkan total usulan masyarakat pada musrenbang adalah sebanyak 288 usulan, sehingga persentase usulan masyarakat yang ditampung pada RKPD 2020 adalah sebesar 89, 24%.

Memperhatikan perbandingan capaian kinerja 3 tahun terakhir dari tabel diatas terlihat terjadi penurunan persentase. Penurunan ini diantaranya disebabkan karena adanya kegiatan pembangunan fisik seperti sekolah, jalan, RSUD dan lainnya yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya (2019). Hal ini menyebabkan adanya kegiatan yang tidak merupakan usulan dari masyarakat namun bersifat kebijakan pemerintah daerah untuk langsung mengakomodir pada RKPD 2020. Disamping itu juga didapati adanya kegiatan/ program yang bersifat *top bottom* yang langsung diusulkan oleh SKPD dalam rangka mengakomodir kegiatan yang lebih tinggi (mandatory).

1.3. Langkah-Langkah Dalam Pencapaian Indikator

Pemerintah Kota Bukittinggi telah merumuskan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta menggunakan aplikasi/ sistem informasi perencanaan pembangunan.

Dengan dikelolanya aplikasi/ sistem informasi perencanaan, SIMDA berdampak lebih transparannya perencanaan program dan kegiatan, dimana masyarakat dapat mengawal program dan kegiatan yang mereka usulkan dapat ditampung pada RKPD tahun kegiatan.

1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

- Kesadaran dari masyarakat untuk senantiasa akan keikutsertaan mereka dalam perencanaan pembangunan.
- Pemerintah Kota Bukittinggi konsisten dalam menggunakan aplikasi perencanaan pembangunan,
- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tertib dalam pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan.

1.5. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 1.5. Program/kegiatan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi

Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Kegiatan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	133.261.228	121.282.176	91.01 %

Sumber : Bapelitbang 2021

Kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Bukittinggi terhadap konstituennya dan daerah pemilihannya juga berkontribusi terhadap program dan kegiatan yang dapat diakomodir pada RKPD. Kegiatan-kegiatan tersebut tersebar pada beberapa SKPD teknis terkait.

SASARAN I.2 : Meningkatkan Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan

2.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran I.2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama yakni **Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (*corporate social responsibility*, manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase jumlah sumbangan atau bantuan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan baik skala kelurahan, kecamatan, maupun kota dala bentuk uang, barang, tenaga dan jasa dan dapat dikonversi atau dihitung dalam bentuk uang terhadap total belanja langsung.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	5	2.63	52.6 %

(APBD)

Sumber : Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda 2021

Jumlah program/ kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui dana CSR tahun 2020 sebesar Rp.1.082.976.000, dengan membandingkan belanja langsung APBD sebesar Rp.446.972.085.273, sehingga didapatkan persentase sebesar 0.24% dengan capaian kerja indikator sebesar 4.8%.

Sementara, jika diakumulasikan jumlah dana CSR sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 tercatat Rp. 11.761.065.401. Dan jika dipersentasekan terhadap APBD kondisi awal anggaran Tahun 2017 senilai Rp. 446.972.085.273, maka didapatkan persentase dana CSR sebesar 2.63%. Tabel diatas menggambarkan akumulasi Dana CSR yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat realisasi tahun 2020 sebenarnya lebih baik dari realisasi yang dicapai pada tahun berjalan. Kondisi pandemi Covid19 yang melanda seluruh dunia dan tidak terkecuali Kota Bukittinggi. Hal ini membuat keprihatinan seluruh pihak termasuk masyarakat dan pihak swasta. Sehingga dalam menghadapi Pandemi ini banyak sekali masyarakat dan Pihak Swasta ikut serta dalam upaya pemerintah dalam menghadapi dan meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid 19 dan dampak-dampaknya. Salah satunya adalah berupa sumbangan dan bantuan yang sebgaiian besar bersifat bantuan barang. Ketika penghitungan realisasi SCR barang-barang yang disumbangkan tersebut sulit untuk dikonversikan kedalam nilai rupiah karena harga yang tidak menentu pada saat itu. Disamping itu rendahnya capaian CSR pada tahun 2020 adalah karena tidak terlaksananya kegiatan Manunggal Sakato Sajati. Alokasi anggaran yang diluncurkan untuk pelaksanaan manunggal ini berupa dana stimulus oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga dalam pelaksanaan manunggal Sakato ini diharapkan mampu menjangring dana masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan.

2.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator diatas dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	5	0.24	4.8 %

Sumber : Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bukittinggi 2021



Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 belum mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2020. Indikator ini masih jauh dalam mencapai target yang ditetapkan. Sementara capaian pada tahun 2017-2019 tidak dapat digambarkan karena adanya perbedaan definisi operasional pada SK penyelarahan RPJMD tahun 2020 dimana pada Indikator baru di SK penyelesaian RPJMD ini dana CSR yang dimaksud adalah dana yang bersumber dari masyarakat dan swasta, sementara pada tahun-tahun sebelumnya dana CSR yang dimaksud adalah dana yang bersumber dari pihak swasta saja.

2.3. Langkah-langkah Dalam Pencapaian Indikator

Sumbangan atau bantuan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan baik skala kelurahan, kecamatan, maupun kota dapat dilihat dalam bentuk uang, barang, tenaga dan jasa yang kemudian dikonversikan dalam bentuk uang.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam upaya menarik sumber dana pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat, CSR, manunggal dan lain sebagainya dilakukan sebagai berikut:

- a. Data potensial CSR yang terealisasi dihimpun dan dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengampu untuk memberikan kemudahan dalam penyaluran dananya bagi pihak pemberi bantuan.
- b. Usulan setiap pembiayaan melalui CSR yang diajukan oleh SKPD pengampu disampaikan pada forum koordinasi CSR pada tahun sebelum rencana bisnis perusahaan pemberi CSR ditetapkan.

2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Realisasi capain indikator yang masih jauh dari harapan tidak dipungkiri menjadi pekerjaan rumah untuk realisasi tahun-tahun selanjutnya. Banyak hal yang terjadi sehingga realisasi capaian indikator masih rendah diantaranya:

- a. Kemampuan pembiayaan perusahaan yang mengalami paceklik dan sulit dalam melakukan pemberian dana CSR untuk dapat merelisasikan ditengah pandemi Covid 19.
- b. Usulan dari satuan kerja perangkat daerah pengampu belum mampu memenuhi kriteria pembiayaan CSR yang diminati oleh perusahaan yang ada di Kota Bukittinggi.

2.5. Alternatif Solusi Dalam Pencapaian Indikator

Kondisi pandemi Covid 19 yang membuat ketidakpastian dalam segala bidang menuntut Pemerintah Kota Bukittinggi untuk turut melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

dan atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang diprediksi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah hingga sektor privat, sehingga keuangan perusahaan-perusahaan pemberi CSR.

Berikut beberapa kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui dana CSR Tahun 2020:

Tabel 2.5. Kegiatan Pembangunan Yang Dibiayai Dana CSR Tahun 2020

SKPD	Pihak Pemberi CSR	Program/ Kegiatan	Nilai	Penerima Manfaat
Sekretariat Daerah	Bank Nagari	Bantuan dana mushalla MAN 1 Bukittinggi	750.000	MAN 1 Bukittinggi
	Bank Nagari	Bantuan Baju Kaos Kegiatan MTQ Tk. Prop	1.500.000	Kafilah MTQ
	Bank Nagari	Hadiah MTQ Tk Kota Bukittinggi	3.000.000	Kafilah MTQ
	Bank Nagari	Sosialisasi Pengurus masjid se Kota Bukittinggi	15.000.000	Pengurus Masjid
	Bank Nagari	Kotak Amal untuk Masjid di Kota Bukittinggi	4.500.000	Masjid
	Bank Nagari	Banner dan Stiker Infak dan Sedekah	2.000.000	Pengurus Masjid
	Bank Nagari	Spanduk dan baliho kegiatan dakwah	4.500.000	Pemerintah Kota Bukittinggi
Dinas Komunikasi dan Informatika	PT Aplikanusa Lintasarta	Infrastruktur Jaringan	836.726.000	Pemerintah Kota Bukittinggi
	PT PLN Persero	Smart Board	45.000.000	Pemerintah Kota Bukittinggi
Dinas Perkim	PT PLN Persero	Bedah rumah pensiunan PLN UIW Sumatera Barat	120.000.000	Masyarakat
Dinas Parpora	PT PLN Persero	Papan informasi digital	50.000.000	Pemerintah Kota Bukittinggi
Jumlah			Rp. 1.082.976.000	

Sumber : Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bukittinggi

Disamping pembiayaan-pembiayaan yang bersumber dari masyarakat pada tabel diatas, untuk penanganan pandemik dan dampaknya begitu banyak sumbangan yang telah disampaikan ke Pemko Bukittinggi namun sebagian besar berupa barang yang tidak bisa dikonversikan ke dalam bentuk rupiah karena kondisi harga yang tidak stabil pada masa pandemi.

2.6. Program/ kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Tabel 2.6. Program/Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan CSR	240.000	240.000	100%

Sumber: Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya ada satu kegiatan penunjang di Bagian Perekonomian dan pembangunan yang digunakan untuk kegiatan koordinasi dan monitoring dana-dana yang bersumber dari masyarakat dan swasta.

SASARAN I.3 : Melibatkan pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah

3.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran I.3 diatas diturunkan pada indikator Kinerja Utama **Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline*** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Perentase jumlah SKPD dan unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline* terhadap jumlah SKPD dan unit kerja pemerintah daerah.

Tabel 3.1 Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	100%	-	0 %

Sumber : Inspektorat Kota Bukittinggi

3.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline* Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 3.2 Perbandingan antara Capaian 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	100 %	-	-

Sumber : Inpektorat Kota Bukittinggi

3.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Saat ini belum ada langkah-langkah strategis yang dilakukan, mengingat indikator kinerja utama Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/ unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline* merupakan indikator baru hasil penyalarsan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2020.

TUJUAN II : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

SASARAN II.1 : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

4.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP** yang secara defenisi operasional adalah Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau dapat dilihat melalui rumus berikut :

$$\text{Nilai SAKIP} = \text{Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah}$$

Tabel 4.1. Capaian Indikator Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	A	BB	95%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi

Nilai SAKIP yang ditampilkan dalam laporan ini baru sampai pada penilaian SAKIP Tahun 2019, mengingat Nilai Sakip untuk tahun 2020 belum rilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Sementara, untuk nilai SAKIP tahun 2019 dari hasil evaluasi terhadap SAKIP Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 memperoleh nilai 70,84 dengan predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan hasil yang baik atas tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Perolehan nilai SAKIP 70,84 menunjukkan hasil dengan kategori **memuaskan**. Ini merupakan bukti bahwa kinerja yang dilakukan pemerintah bukan hanya terpaku pada penyerapan anggaran tetapi juga fokus pada pencapaian hasil dan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Perkembangan capaian hasil penilaian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Tabel Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai			
			2016	2017	2018	2019
A	Perencanaan Kinerja	30	16,54	19,44	22,00	22,00
B	Pengukuran Kinerja	25	10,31	13,48	16,16	16,16
C	Pelaporan Kinerja	15	9,65	10,22	10,58	10,58
D	Evaluasi Internal	10	4,34	6,94	7,83	7,83



E	Capaian Kinerja	20	9,5	10,13	13,81	14,27
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,34	60,21	70,39	70,84
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	BB	BB	BB

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi

4.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Nilai SAKIP Kota Bukittinggi tiga tahun terakhir:

Tabel 4.2. Perbandingan antara Nilai SAKIP 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Nilai SAKIP	
		Realisasi	Capaian Kinerja
2017	B	B	100 %
2018	BB	BB	100 %
2019	BB	BB	100 %
2020	A	-	-

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2019 telah sesuai target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir, capaian kinerja tahun 2019 merupakan capaian kinerja dengan persentase tertinggi. Sangat diharapkan bahwa hasil penilaian SAKIP Tahun 2020 semakin terjadi peningkatan.

4.3. Langkah-langkah Dalam Pencapaian Indikator

Sehubungan dengan belum keluarnya hasil penilaian SAKIP 2020, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya melakukan perbaikan dengan mempedomani hasil evaluasi 2019 dan beberapa langkah lainnya diantaranya:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berupaya mengintegrasikan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja sejalan dengan Akuntabilitas Keuangan;
2. Pemerintah Kota Bukittinggi telah SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, namun efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belum fokus dalam pencapaian kinerja masih harus ditingkatkan;
3. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari laporan evaluasi tahun 2018, namun perbaikan tersebut belum dilaksanakan secara tuntas sehingga belum ada peningkatan yang signifikan dalam implementasi manajemen kinerja;
4. Beberapa catatan penting terkait kualitas implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 adalah:
 - a. Masih terdapat Sasaran Strategis pada RPJMD maupun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menggambarkan kinerja (*outcome*) yang diharapkan akan dicapai;



- b. Masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria kualitas yang baik atau SMART, terutama terkait dengan keterukuran (*measurable*) dan relevansi dengan sasaran strategis yang akan diukur serta orientasi hasil;
- c. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan penjabaran kinerja secara berjenjang (*cascading*), namun hasil penjabaran kinerja tersebut selaras dengan kinerja yang telah ditetapkan;
- d. Belum seluruh program dan kegiatan pada level OPD berkorelasi langsung dengan sasaran strategis pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
- e. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Ukuran kinerja dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai;
- f. Evaluasi program belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Evaluasi program seharusnya dilakukan oleh penanggungjawab program untuk menilai ketercapaian hasil program maupun berbagai program lintas OPD;
- g. Telah membangun aplikasi untuk pengumpulan data kinerja dari setiap OPD, namun belum digunakan sebagai media *monitoring* dan evaluasi kinerja. *Monitoring* dan evaluasi program yang dilaksanakan masih fokus pada pemantauan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga belum maksimal untuk memastikan ketercapaian kinerja organisasi secara keseluruhan;
- h. Laporan Kinerja telah dibuat baik pada level pemerintah Kota maupun pada seluruh OPD, namun sebagian besar Laporan Kinerja OPD belum menggambarkan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan analisis atas capaian kinerja hanya membahas kesimpulan dari berbagai capaian yang diperoleh dan belum mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut serta alternatif strategi untuk pencapaiannya di masa yang akan datang;

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Inspektorat belum mampu memicu perbaikan akuntabilitas pada OPD secara optimal.

4.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab keberhasilan dari indikator ini adalah komitmen yang sangat kuat dan tinggi dari pimpinan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Adanya pendampingan langsung oleh KemenPAN RB terhadap kekurangan dari SAKIP di tahun yang lalu sehingga menjadikan perencanaan Kota Bukittinggi semakin terarah sesuai dengan *cascade down* perencanaan. Disamping itu juga peran serta aktif Kepala SKPD beserta seluruh jajarannya dalam mengimplementasikan SAKIP ini di SKPD masing-masing serta selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik.

4.5. Solusi dalam Pencapaian Target Indikator

Untuk mengawal implementasi SAKIP di Pemerintah Kota Bukittinggi, salah satu upaya yang dilakukan adalah Pemerintah Kota Bukittinggi telah membentuk Tim Koordinasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi sejak Tahun 2019, yang terdiri dari unsur-unsur Bapelitbang, Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat Kota. Tim ini berperan dalam pendampingan bagi SKPD dalam penyusunan perencanaan hingga penyusunan LKIP sehingga SKPD menjadi lebih terarah dalam penyusunan kelengkapan dokumen SAKIP tersebut.

Selain itu indikator nilai SAKIP ini antara lain Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan LKIP Kota, kegiatan penyusunan perencanaan pada masing-masing SKPD serta kegiatan reviu LKIP Kota dan SKPD.

Sasaran II.1 juga diturunkan pada indikator **Nilai EKPPD** (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang secara defenisi operasional adalah nilai yang diperoleh atas penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau dapat dilihat melalui rumus berikut :

Nilai EKPPD =	Nilai yang diperoleh atas penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	3,2293 dengan status kinerja Sangat Tinggi

Hingga laporan ini dibuat, Nilai EKPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri masih didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018. Hal ini dibuktikan melalui piagam penghargaan yang diberikan kepada Kota Bukittinggi tertanggal 25 April 2020 dengan skor 3,2293 dan status kinerja **Sangat Tinggi**.

5.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 5.1 Capaian Indikator Nilai EKPPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai EKPPD	3,361	3,2293	96.08 %

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

Dalam evaluasi EKPPD tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018 dilakukan dengan menilai 2 (dua) variable yakni : 1. Indeks Capaian Kinerja 95% yang terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan dan 2. Indeks Kesesuaian Materi 5%. Penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri dari 13 aspek dan 43 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sedangkan pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu penilaian yang terdiri dari aspek Administrasi dan Urusan Pemerintahan yang meliputi 8 aspek dengan 21 IKK yang mencakup urusan wajib, pilihan, fungsi penunjang umum pemerintahan dan urusan pemerintahan dengan jumlah IKK sebanyak 630 mendapatkan skor dengan kategori prestasi Tinggi.

Penilaian indeks capaian kinerja terhadap tataran pengambil kebijakan, yakni kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada “tataran pelaksana kebijakan daerah”, yakni kinerja satuan kerja perangkat daerah. Tataran pengambil kebijakan terdiri dari 13 aspek dengan 43 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian pada “tataran pengambil kebijakan” mendapat skor 3,2293 atau dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi**.

Sementara untuk indeks Kesesuaian Materi, dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci mendapatkan nilai dengan peringkat sangat tinggi.

Dari hasil LHE atas EKKPD dan LPPD Kota Bukittinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhadap 3 IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan yang memperoleh nilai Rendah agar ditingkatkan capaian kerjanya,
2. Terhadap 132 IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan pada kelompok Administrasi Umum dengan prestasi Rendah untuk dilakukan peningkatan capaian penilaian kerjanya.
3. Terhadap 1 Urusan Wajib (Kepemudaan dan Olahraga) dan 1 urusan Pilihan (Perindustrian) dengan prestasi Rendah untuk juga ditingkatkan capaian kerjanya.

5.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Nilai **EKPPD** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 5.2 Perbandingan antara Nilai **EKPPD** dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Nilai EKPPD		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	3.360	3.1668	94.25 %
2018	3.361	3.2293	96.08 %
2019	-	-	Belum diterima
2020	-	-	Belum diterima

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2018 telah melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017. Dan hingga saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi masih menunggu hasil penilaian EKPPD Tahun 2019 dan 2020 dari Kementerian Dalam Negeri.



5.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Keberhasilan indikator ini adalah adanya upaya yang serius dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam evaluasi yang dilakukan dari indikator penilaian dapat terpenuhi secara maksimal.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah adalah dengan membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Mandiri Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui keputusan Walikota Bukittinggi dengan tugas utamanya melakukan *self assessment* terhadap kinerja pemerintah daerah sebelum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Nasional. Dengan adanya tim ini diharapkan lebih awal dapat mengukur capaian kinerja dan dapat mengukur strategi untuk meningkatkan kinerja secara nasional. Upaya yang dilakukan yakni :

1. Membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
2. Melakukan *interview* langsung dengan SKPD terkait dengan data IKK yang disampaikan serta membandingkan dengan data tahun sebelumnya;
3. Melakukan konsultasi yang intensif dengan Tim Daerah yang terdiri dari Inspektorat, BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dan Biro Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat;
4. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan agar SKPD meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, dalam upaya lain yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan proses verifikasi Inspektorat Kota Bukittinggi agar perangkat daerah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mengadakan/ menyediakan data yang diminta, namun kondisi pada Tahun 2020 dimana perangkat daerah rata-rata hanya menyampaikan form isian IKK namun tidak melampirkan data pendukung dalam bentuk *hardcopy* sehingga Inspektorat belum mampu memaksimalkan dalam melakukan verifikasi data pendukung IKK.

5.4 . Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pecapaian Indikator

Tidak ada kendala berarti, namun hanya ditemui saat penyusunan laporan LPPD. Tim Pengolah Data yang dibentuk dengan beranggotakan Kasubag Perencanaan SKPD yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dari masing-masing SKPD dan untuk selanjutnya diserahkan ke Tim Penyusun yang akan menyusun LPPD masih kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

Anggota tim dikeluhkan dengan data-data dan informasi dari SKPDnya masing-masing yang masih belum rampung, sehingga belum memenuhi kebutuhan dari tiap-tiap indikator yang dibutuhkan.



Selain itu, hasil mutakhir penilaian LPPD dari Kementerian Dalam Negeri yakni baru sampai tahun 2018 tidak mampu menjawab target dan capaian laporan SAKIP untuk tahun 2020.

Namun demikian rata-rata persoalan yang terjadi adalah dari proses menyajikan data yang tidak maksimal dari SKPD untuk tiap-tiap indikator kinerja kunci sesuai dengan ketentuan, serta penyampaian data pendukung IKK tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga proses *review* Inspektorat yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari tidak berjalan maksimal.

5.5 Alternatif Solusi Dalam Pencapaian Indikator

Setelah LPPD selesai disusun, selanjutnya akan diserahkan ke SKPD untuk di *review* jika terdapat ketidaksesuaian akan diperbaiki dan setelah itu akan dilakukan *review* oleh Inspektorat.

Bagian Pemerintahan Setda sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam penyelesaian penyusunan LPPD juga intens dalam melakukan komunikasi dengan berbagai SKPD terkait sehingga LPPD ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi terus menginformasikan kepada SKPD dengan capaian IKK yang rendah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan data dan capaian kinerja secara mandiri sebelum dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun berkenaan dan sebagai bahan evaluasi pada tahun selanjutnya.

5.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Tabel 5.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	12.700.000	3.175.000	25 %
Penyusunan LPPD	22.193.600	16.484.160	74.27 %

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

SASARAN II.2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

6.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah** yang secara defenisi operasional adalah Hasil evaluasi/ Opini BPK atas laporan keuangan daerah.

Tabel 6.1 Capaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Sumbar 2020

Untuk Tahun 2020, laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi sedang dalam tahapan penyusunan, sehingga untuk opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum dapat diketahui.

Namun untuk tahun 2019 Sesuai Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat Nomor 84/S-HP/XVIII.PDG/06/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah adalah WTP dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian;
2. Sistem Pengendalian Intern, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang PBB-P2 dan Piutang Retribusi tidak didukung dengan data yang valid dan berpotensi tidak tertagih sebesar Rp. 10.125.145.777,
 - b. Pengelolaan dana bergulir pada kelompok UEM-SP tidak tertib,
 - c. Pengelolaan dan Penatausahaan asset tetap Pemko Bukittinggi belum tertib.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Penilaian LKPD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bukittinggi adalah WTP, dan ini merupakan penilaian WTP yang ketujuh kalinya berturut-turut bagi pemerintah Kota Bukittinggi

6.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 6.2 Perbandingan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	WTP	WTP	100 %
2018	WTP	WTP	100 %
2019	WTP	WTP	100 %
2020	WTP	WTP	100%

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2021

Secara nyata Pemerintah Kota Bukittinggi telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK selama 7 Tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset yang sudah sangat baik.

6.3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

1. Identifikasi permasalahan dengan mengumpulkan berbagai temuan pada pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan melihat *trend* pemeriksaan melalui gelar pengawasan oleh Inspektorat,
2. Menindaklanjuti temuan BPK yang berpotensi mempengaruhi kewajaran laporan keuangan,
3. Pencegahan temuan berulang dan deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan dan *asset* SKPD dan PPKD,
4. Monitoring setiap progres penyusunan laporan keuangan dari entitas akuntansi SKPD sampai laporan konsolidasian pada entitas pelaporan PPKD,
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.

6.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (standar akuntansi pemerintahan).

6.5. Alternatif Solusi dalam pencapaian indikator

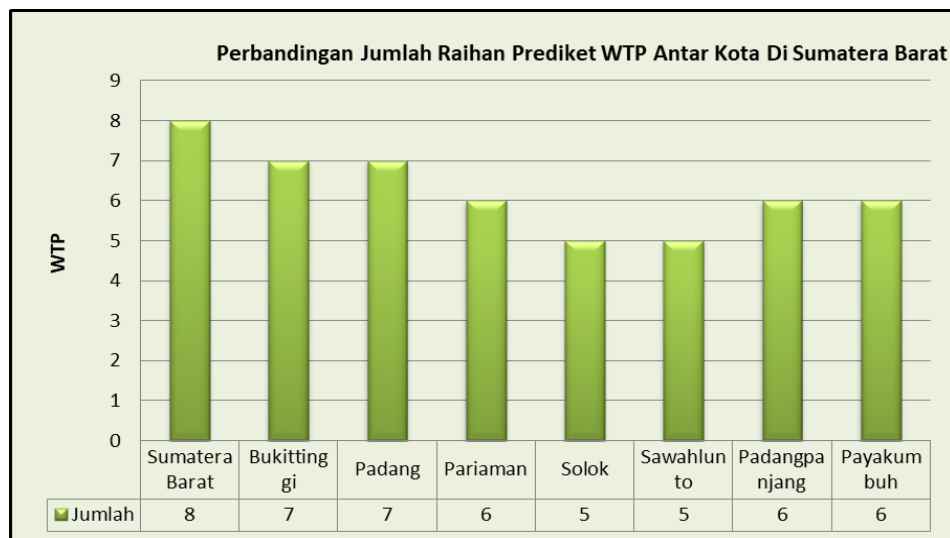
Adapun alternatif solusi dalam pencapaian indikator yang dilakukan diantaranya :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan SKPD,
2. Meningkatkan penguatan monitoring dan evaluasi,
3. Melaksanakan *accounting help desk*.



Ket: Penerimaan Penghargaan Capaian Standar Tertinggi/ WTP LKPD

Grafik 6.5 Perbandingan jumlah raihan prediket WTP Antar Kota di Sumatera Barat



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran II.2 juga diturunkan pada indikator **Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK** yang secara defenisi operasional adalah Jumlah SKPD yang mendapat prediket Wilayah Bebas dari Korupsi.

7.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 7.1 Capaian Indikator Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK	1	0	0

Sumber: Inspektorat Kota Bukittinggi

7.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 7.2 Perbandingan antara Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	1	0	0

Sumber: Inspektorat Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sebagai indikator baru yang dimunculkan melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota



Bukittinggi Nomor 45 tahun 2017 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021. Dan dari target 1 SKPD/ unit kerja yang diusulkan untuk WBK belum terealisasi di tahun 2020 sehingga belum terealisasi.

7.3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator

Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan penilaian terhadap 2 (dua) SKPD untuk dilakukan penilaian. 2 (dua) SKPD yang diusulkan tersebut yakni Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Usulan penilaian masih dalam tahapan proses dan menunggu konfirmasi dari KemenPAN dan RB.

7.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Pada tahun 2020, salah satu persyaratan mutlak bagi SKPD yang diajukan untuk penialain WBK adalah progress penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan harus 100 % selesai. Namun karena 2 SKPD yang diusulkan ini masih belum bisa menyelesaikan progres tindaklanjut hasil pemeriksaan ini, maka tidak dapat melangkah ke proses penilaian selanjutnya.

7.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Telah dilakukan asistensi dan pendampingan terhadap SKPD yang diusulkan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan penialain WBK terutama terkait penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan. Tetap tidak dapat dipenuhi tepat waktu karena terdapat beberapa temuan membutuhkan waktu cukup panjang untuk penyelesaiannya seperti perubahan Perda dan Perwako.

Untuk menghadapi tahun 2021, Inspektorat akan memprioritaskan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan bagi SKPD/ Unit Kerja yang akan diusulkan untuk meraih predikat WBK, melalui monev yang lebih intensif pada SKPD/ Unit Kerja terkait.

SASARAN II.3 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran II.3 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik** yang secara defenisi operasional dapat diartikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan anatara harapan dan kebutuhannya.

8.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 8.1. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	80	82.869	103.58 %

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi 2021

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan hasil kuesioner pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap unit kerja/ SKPD pelayanan publik Tahun 2020 kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dengan baik dan benar serta sesuai dengan petunjuk PermenPAN dan RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- b. Berdasarkan analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei kepuasan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi 82.869 dengan mutu pelayanan kategori **B (Baik)**. Adapun nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut :
 1. Persyaratan Pelayanan berada diangka 3,294
 2. Sistem, Mekanisme dan prosedur berada diangka 3,280
 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan berada di angka 3,264
 4. Biaya atau Tarif Pelayanan berada di angka 3,320
 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan berada di angka 3,301
 6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan berada di angka 3,324
 7. Perilaku Pelaksana 3,354
 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam Pelayanan berada di angka 3,319
 9. Sarana dan prasarana berada diangka 3,406

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk mengetahui Nilai IKM dihitung dengan cara sebagai berikut :
 $(3,294 \times 0,11) + (3,280 \times 0,11) + (3,264 \times 0,11) + (3,320 \times 0,11) + (3,301 \times 0,11) + (3,324 \times 0,11) + (3,354 \times 0,11) + (3,319 \times 0,11) + (3,406 \times 0,11) = 3,315 = \text{Nilai Indeks}$

Dengan demikian nilai indeks kepuasan masyarakat Kota Bukittinggi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai IKM setelah di konversi = Nilai Indeks x Nilai dasar
 $= 3,315 \times 25$
 $= \mathbf{82.869}$
2. Mutu pelayanan **B (Baik)**
3. Kinerja pelayanan **Baik**

8.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 8.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	70	80.45	100 %
2018	75	87.35	116.46 %
2019	75	85.03	113.37 %
2020	80	81,708	103.58 %

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 telah melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir, capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan capaian kinerja.

Diakui bahwa capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sudah melebihi target. Namun yang harus dicapai dan ditetapkan kedepannya adalah pelayanan publik 100%. Sehingga apabila diukur maka capaian lebih 100% berarti pelayanan yang diberikan melebihi eskpektasi masyarakat.

8.3 . Langkah-langkah Pengoptimalan Pencapaian Indikator

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bukittinggi terus memberikan perhatian pada hal-hal yang merupakan prioritas pembenahan. Prioritas pembenahan yang direkomendasikan tersebut antara lain:

- a. Upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kualitas sarana prasarana dan prosedur, sistem dan mekanisme pelayanan publik.
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang bisa memperbaiki perilaku petugas, sehingga dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan petugas dapat lebih memperbaiki sikap dan perilaku dan bisa lebih sabar dalam menghadapi pengguna pelayanan publik.



- c. Memperbaiki sistem penanganan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga seluruh pengaduan dapat diatasi dengan cepat dan transparan
- d. Memberikan informasi secara jelas kepada publik tentang persyaratan pelayanan publik yang harus dipenuhi dengan menambah jumlah media informasi dan menempatkannya ditempat yang dapat dengan mudah dilihat sehingga informasinya dapat dibaca jelas oleh publik.
- e. Mendorong SKPD/ unit kerja pelayanan publik untuk terus melakukan inovasi pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan dapat dirasakan lebih efektif dan efisien bagi penerima pelayanan dan pemberi pelayanan.

8.4. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah mampu melampaui target indikator yang ditetapkan yaitu dengan nilai 80. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan kebijakan terhadap objek-objek wisata dengan mengalihkan pengunjung untuk menggunakan Kartu Brizzi sebagai alternatif pembayaran cash menjadi penggunaan transaksi elektronik. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Bank BRI melalui produk Kartu Brizzi sebagai andalannya sedikit membentuk opini kurang baik di kalangan masyarakat banyak. Hal ini tidak terlepas dari masih minimnya sarana dan prasarana pendukung produk Kartu Brizzi ini serta sosialisasi yang masih minim.
- b. Karena adanya pandemic Covid-19 turut menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat di banyak unit layanan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak berjalan optimal dan mengalami banyak kendala. Kondisi baru tercipta akibat Covid 19, sehingga butuh waktu bagi Pemerintah dan masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri, produk dan layanan masyarakat dapat saling memberi dan menerima layanan.

8.6. Alternatif solusi dalam Pencapaian Indikator

- a. Menyikapi kondisi diatas, Pemerintah Kota Bukittinggi terus melakukan peninjauan terhadap penggunaan produk Kartu Brizzi. Kedepan upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat penikmat dan pengunjung objek wisata akan menjadi prioritas dalam layanan terbaik dengan tetap mempertimbangkan tujuan awal dari penggunaan Kartu Brizzi yakni kemudahan dan akuntabilitas.
- b. Langkah-langkah strategis terus dilakukan guna tetap memberikan layanan masyarakat ditengah kondisi Pandemi Covid 19.

8.7. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya yang mendukung dari indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dimaksimalkan dari sumber daya manusianya, dimana telah dilakukan bimbingan kepada SKPD layanan publik serta telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan layanan publik. Selain itu, pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan juga dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia pelayanan pelayanan di SKPD/ unit pelayanan senantiasa dikembangkan sehingga pelayanan yang diberikan bisa dioptimalkan.

SASARAN II.4 : Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan

Sasaran II.4 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase total realisasi PAD terhadap APBD. Pada tahun 2020 total realisasi PAD adalah sebesar Rp. 57.285.158.267.72 sedangkan total APBD sebesar Rp. 687.948.962.905.72. Jika diasumsikan kedalam formulasi dari defenisi operasional indikator kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat dilihat melalui formulasi berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total Realisasi PAD} \times 100\%}{\text{APBD}}$$

$$= \frac{\text{Rp. 57.285.158.267.72} \times 100\%}{\text{Rp 687.948.962.905.72}}$$

$$= \underline{\underline{8.33\%}}$$

9.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 9.1 Capaian Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	13.7%	8.33%	60.78%

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi

9.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 9.2 Perbandingan antara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	12.6%	7.77%	61.70%
2018	13%	9.54%	73.35%
2019	13.3%	10.02%	75.34%



2020

13.7%

8.33%

60.78%

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan 3 tahun sebelumnya. *Refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah kepada penanganan dampak Covid 19 sangat mempengaruhi capaian kinerja indikator.

9.3 . Langkah-langkah Pengoptimalan Pencapaian Indikator

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pencapaian indikator:

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah,
2. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah,
3. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyeteroran,
4. Memberikan insentif secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan,
5. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi aparatur pemungut dan pengelola PAD,
6. Senantiasa melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak agar taat pajak.

9.4. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa keberhasilan pencapaian indikator disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengawasan pajak dan retribusi daerah melalui penggunaan *cash register* yang terintegrasi
2. Adanya sanksi pengenaan denda pajak dan retribusi sehingga meninggalkan kesadaran wajib pajak dan untuk membayar pajak tepat waktu
3. Kinerja aparatur pengelola pajak yang sudah cukup optimal

Namun demikian, dalam pencapaian indikator tersebut masih ditemui beberapa kendala sehingga terjadinya penurunan capaian kinerja pada Tahun 2020 diantaranya:

1. Adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat untuk menekan angka persebaran kasus Covid-19 sehingga beberapa objek yang merupakan sumber penerimaan PAD tidak berjalan/ beroperasi secara optimal bahkan ada yang ditutup seperti: objek-objek wisata, hotel dan penginapan, rumah makan dan restoran serta objek-objek lainnya yang menjadi sumber penerimaan.
2. Adanya program *recofusing* dan relokasi anggaran berimbas kepada dana transfer ke daerah direalokasi oleh pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19.



9.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pencapaian target indikator, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya untuk mengadakan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya membayar pajak serta melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

9.6. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 9.6. Program dan Kegiatan Peningkatan Penerimaan PAD

Program/ Kegiatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Persentase Capaian
Program Peningkatan Penerimaan PAD	1.276.002.514	1.149.256.065	90.07 %
Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah	355.361.592	322.519.971	90.76 %
Penyusunan dokumen pajak daerah	171.440.922	161.770.122	94.36 %
Peningkatan, pengawasan dan penagihan pajak daerah	700.000.000	624.324.172	89.19 %
Peningkatan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah (SIPD)	49.200.000	40.641.800	82.61 %

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2021

9.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Kota Bukittinggi di Tahun 2020 senantiasa meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola PAD sehingga pencapaian indikator kinerja menjadi lebih optimal terutama dalam kondisi Pandemi Covid 19. Ditengah keterbatasan waktu dan ruang gerak untuk mengaplikasikan kegiatan di lapangan Pemerintah Kota Bukittinggi terus menjaga kestabilan pemasukan daerah dari sektor-sektor PAD andalan. Disamping itu adanya sanksi peneraan denda pajak dan retribusi juga ikut meningkatkan PAD karena hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, serta pengawasan pajak dan retribusi daerah melalui penggunaan *cash register* yang terintegrasi.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan meningkatkan pengawasan dan menggunakan teknologi informasi dalam penyederhanaan dan mempermudah pelayanan dalam penerimaan pajak dan retribusi.

TUJUAN III : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

SASARAN III.1 : Peningkatan Kualitas Jalan

Sasaran III.1 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Jalan Mantap** yang secara defenisi operasional dapat diartikan persentase panjang jalan kewenangan kota yang berkondisi mantap terhadap total panjang jalan kewenangan kota. Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi sebagai *leading* sektor dan pengampu indikator kinerja diatas, panjang jalan yang menjadi kewenangan kota dengan kondisi baik adalah sepanjang 159,714 km. sedangkan total panjang jalan yang menjadi kewenangan kota adalah 180.169 km. dan apabila diformulasikan maka indeks jalan mantap dapat dilihat melalui rumus berikut:

$$\text{Indeks Jalan Mantap} = \frac{\text{Panjang Jalan kewenangan kota yang berkondisi baik}}{\text{Total panjang jalan kewenangan kota}} = \frac{159.714 \text{ km}}{180.169 \text{ km}} = 89 \%$$

10.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 10.1 Capaian Indikator Indeks Jalan Mantap

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Jalan Mantap	100 %	89 %	89 %

Sumber : Dinas PUPR Kota Bukittinggi 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Indeks Jalan Mantap pada tahun 2020 adalah 89% artinya dari 180.169 Km panjang jalan yang ada di Kota Bukittinggi, terdapat 159.714 Km yang berkondisi baik (89%). Kondisi yang diharapkan adalah semua ruas jalan yang ada di Kota Bukittinggi harus dalam kondisi baik. Namun, pada kenyataannya masih terdapat 11% dari panjang ruas jalan di Kota Bukittinggi yang berkondisi sedang maupun rusak ringan. Hal ini berfluktuasi dan berpotensi untuk mudah merubah tergantung kepada kondisi alam dan beberapa kondisi lainnya. Hal inilah yang harus dicermati oleh Pemerintah Kota untuk menjadikan semua badan jalan baik dan tidak mengganggu kondisi lalu lintas.

10.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian Indeks Jalan Mantap Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 10.2 Perbandingan Indeks Jalan Mantap Tahun 2020 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Jalan Mantap		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	88 %	86.66%	98%
2018	100 %	88.10%	88,1%
2019	100 %	88.65%	88,65%
2020	100 %	89%	89%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 89% dari target 100% yang ditetapkan. Artinya masih ada 11 % dari panjang jalan 180.169 km yang belum berkondisi baik. Capaian pada tahun 2020 merupakan capaian tertinggi pada 3 tahun terakhir.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 telah melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2020. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir, capaian kinerja tahun 2020 merupakan capaian kinerja dengan persentase tertinggi. Menurut BPS Kota Bukittinggi (Statistik Kota Bukittinggi 2020), membagi kondisi jalan Kota Bukittinggi dari panjang keseluruhan jalan Kota Bukittinggi sepanjang 180.17 km sebagai berikut:

Tabel 10.2.1 Kondisi Jalan Kota Bukittinggi

Kondisi Jalan	Persentase	Panjang
Kondisi Baik	33.86 %	61 km
Kondisi Sedang	53.23 %	95.90 km
Kondisi Rusak	11.94 %	21.51 km
Kondisi Rusak Berat	0.97 %	1.74 km

Sumber BPS Kota Bukittinggi (Statistik Kota Bukittinggi 2020)

10.3. Langkah-langkah Pencapaian Indikator

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mencapai target indikator adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemenuhan terhadap kriteria indikator kinerja jalan,
2. Melaksanakan pekerjaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan didukung dana APBD yang cukup,
3. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penanganan jalan.

10.4 . Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pekerjaan konstruksi jalan selesai dengan baik dan tepat waktu,



2. Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan konstruksi yang tepat,
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/ permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Sementara itu, beberapa hal juga terjadi yang menyebabkan kendala dalam pencapaian indikator diantaranya:

1. Kelemahan penyedia jasa dan menyelesaikan pekerjaan dan administrasi pekerjaan,
2. Kondisi lapangan kadang mengalami kendala dan perubahan rencana,
3. Adanya beberapa dampak akibat bencana alam yang tidak bisa diprediksi.

10.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi terkait pencapaian target indikator sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa untuk menyelesaikan seluruh administrasi pekerjaan
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan pengkajian dan penatan kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan.
3. Mengalokasikan dana yang cukup untuk pemeliharaan jalan.

10.6 Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 10.6. Program/ Kegiatan Indeks Jalan Mantap

Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
Pembangunan Jalan dan Jembatan			
Peningkatan Trotoar	2.299.337.800	2.081.484.010.028	90.52 %
Peningkatan jalan konsolidasi by pass	40.000.000	39.796.000	99.49 %
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
Rehabilitasi/ Pemeliharaan rutin Jalan dalam Kota	798.833.904	739.433.085	92.56 %
Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	374.375.428	347.289.350	92.76 %
Pemeliharaan berkala jalan dalam kota DAK Fisik	6.862.909.000	5.642.482.821	82.21 %
Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum			
Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Fasilitas Umum	713.233.904	691.899.489	97 %
Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Fasilitas Umum	16.947.097	12.931.200	76.30 %

Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum	2.950.000.000	1.915.587.550	64.93 %
Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum	547.933.000	537.052.425	98.01 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan serta sarana dan prasarana sudah dilakukan cukup banyak sehingga diharapkan kondisi jalan menjadi kewenangan Kota selalu dalam kondisi yang baik.

SASARAN III.2 : Peningkatan Kualitas Air Minum

Sasaran III.2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Air Minum Layak** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak terhadap total rumah tangga, atau dapat dilihat melalui rumus berikut

$$\text{Indeks Air Minum Layak} = \frac{\text{Jumlah Pdd dg akses AML} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\frac{114.211 \times 100\%}{128.783}$$

$$88,68\% \text{ (Perhitungan Th 2019)}$$

11.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 11.1. Capaian Indikator Indeks Air Minum Layak Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Air Minum Layak	95 %	88.68	93.34%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari target 95% indeks air minum layak, baru terealisasi 88.62% dengan capaian 93.26%. Artinya dari target 95% jumlah penduduk Kota Bukittinggi, yang sudah mengakses air minum layak adalah sebesar 93.26%.

11.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Air Minum Layak** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 11.2. Perbandingan antara Indeks Air Minum Layak 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Air Minum Layak		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	85	-	-



2018	90%	87.31	93.67
2019	95 %	88.68	93.34
2020	95 %	88.68	93.34

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2021

11.3. Langkah-langkah Dalam Pencapaian Indikator

Pada tahun 2020 dengan terjadinya wabah pandemi Covid 19, hampir semua kegiatan terhenti, sehingga petugas tidak dapat melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebagaimana mestinya. Sehingga penghitungan indikator Indeks Air Minum Layak tidak dapat dilakukan.

11.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi memprediksi bahwa Indeks Air Minum Layak di Kota Bukittinggi untuk Tahun 2020 angkanya tidak akan bergerak jauh dari penghitungan Tahun 2019. Hanya saja, untuk penghitungan angka pasti, tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi mengingat terkendalanya petugas untuk turun ke lapangan guna melakukan pendataan dan menggali informasi lebih dalam terkait penghitungan Indikator tersebut. Kegiatan turun langsung ke lapangan dan intensitas pertemuan dengan banyak orang yang tidak dapat dilakukan ditambah dengan jumlah jam kerja yang berkurang sangat signifikan akibat pola kerja yang berubah dari kantor ke rumah atau yang akrab disebut *Work From Home* (WFH), menjadi hambatan tersendiri dalam mendapatkan angka pada indikator ini.

11.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2021 berkomitmen untuk menjemput bola pencapain indikator Indeks Air Minum Layak dengan melakukan beberapa solusi sebagai berikut:

- a. Akan menurunkan petugas untuk melakukan survey Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di Tahun 2021.
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana dalam mendapatkan akses air minum layak.
- c. Melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dari berbagai lintas sektor dari unsur Pemerintahan seperti Bapelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim, DPMPSTPTK dan PDAM untuk menguatkan peran pemerintah sebagai penyedia layanan akses air minum layak bagi masyarakat Kota Bukittinggi.

SASARAN III.3 : Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Sasaran III.3 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Akses Sanitasi Layak** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak terhadap total rumah tangga.

12.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 12.1. Capaian Indikator Indeks Akses Sanitasi Layak

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Akses Sanitasi Layak	100	82.17	82.17%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2021

Sanitasi merupakan usaha untuk membina dan menciptakan kondisi yang baik dibidang kesehatan khususnya kesehatan masyarakat. Penanganan sanitasi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan limbah, persampahan dan drainase lingkungan terutama kawasan permukiman. Sanitasi dikatakan layak apabila toilet dimasing-masing rumah tangga sudah dilengkapi dengan sarana pengolahan air limbah yang memenuhi standar teknis baik untuk skala individual maupun skala komunal.

Pembangunan sanitasi Kota Bukittinggi telah dirumuskan dalam buku putih Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dimuat dalam bentuk memorandum program integrasi pemerintah kota, provinsi dan nasional melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang.

Dari data BPS Kota Bukittinggi Tahun 2020, disampaikan bahwa sebanyak 82,17 % rumah tangga di Kota Bukittinggi menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri, sementara 17,83 % masih menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama, MCK Umum, dan tidak ada/ tidak menggunakan fasilitas buang air besar.

Selain itu, BPS Kota Bukittinggi juga mencatat bahwa 0,2 % Rumah tangga yang tidak menggunakan jenis kloset leher angsa dan 8.08% Rumah tangga yang tidak menggunakan tangki septik/ IPAL/ SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah) sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.

12.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian Indeks Akses Sanitasi Layak Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 12.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Akses Sanitasi Layak 3 Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Akses Sanitasi Layak		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	90%	90.05 %	100.05 %
2018	95%	95.94 %	100 %
2019	100%	96.38 %	96.38 %
2020	100%	82.17 %	82.17%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2021



Sumber: BPS Kota Bukittinggi 2020/ Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

12.3. Langkah-langkah Dalam Pencapaian Indikator

Pengawasan dan pembinaan pada usaha/ kegiatan telah dilakukan agar taat aturan dalam pengelolaan lingkungan seperti air limbah, limbah B3, kualitas udara, sampah padat, dan lain-lain. Selain itu juga dilakukan penguatan pada sarananya seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3), pemantauan udara, tempat sampah terpilah, dan lain sebagainya.

Jika usaha/ kegiatan yang dilakukan taat aturan, semua yang dibuang ke lingkungan sudah dibawah baku mutu yg diperbolehkan, maka tidak akan mencemari lingkungan.

12.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Dalam upaya untuk menurunkan beban pencemaran, maka harus ada kegiatan yang dilakukan oleh lintas perangkat daerah terkait, semisal Dinas Pekerjaan Umum: melakukan pembangunan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) atau septik tank komunal pada titik-titik tertentu di sepanjang aliran sungai Batang Agam. Lain halnya oleh Dinas Kesehatan: seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi terpadu tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sasaran III.3 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase luas kawasan tidak kumuh terhadap total luas wilayah. Dari data dan informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi bahwa luas wilayah Kota Bukittinggi secara keseluruhan seluas 2524 Ha. Sementara luas wilayah Kota Bukittinggi yang tidak kumuh adalah seluas 2459,22 ha dan luas wilayah permukiman yang kumuh seluas 64.78 ha. Sehingga Indeks Kawasan Permukiman Tidak Kumuh Perkotaan Kota Bukittinggi 97.43% atau dapat dilihat melalui formulasi berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan} &= \text{luas} \\ &\text{kawasan tidak kumuh/ total luas wilayah} \times 100\% \\ &= 2459,22 \text{ ha/ } 2524 \text{ Ha} \times 100\% \\ &= \underline{97.43\%} \end{aligned}$$

13.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 13.1. Capaian Indikator Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	99.80	97.43	97.62 %

Sumber: Dinas Perkim Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi 2021

Luas kawasan tidak kumuh Kota Bukittinggi tahun 2020 seluas 2459,22 Ha sesuai dengan SK Kumuh tanggal 25 September 2020. Sehingga dari keseluruhan luas wilayah kota seluas 2524 Ha, terdapat kawasan permukiman kumuh seluas 64,78 ha.

Mengacu pada tabel diatas maka didapatkanlah Indeks kawasan permukiman tidak kumuh perkotaan 97,43% sehingga untuk Tahun 2020 capaian kinerja untuk indikator diatas adalah 97,62%.

13.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 13.2. Perbandingan Capain Kinerja antara **Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan** Tahun 2020 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	99.21	-	-
2018	99.41	98.69	98.57 %
2019	99.60	99.87	100.27 %
2020	99.80	97.43	97.62%

Sumber: Dinas Perkim Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi 2021



Berdasarkan tabel diatas, di Tahun 2018, luas kawasan permukiman tidak kumuh seluas 2491,1 ha atau seluas 98,69%, dengan luas permukiman kumuh seluas 32.9 ha didapat capaian kinerja indeks kawasan permukiman tidak kumuh 98,57%. Di tahun 2019, luas kawasan permukiman tidak kumuh seluas 2520.8 ha atau seluas 99.87% dimana masih terdapat kawasan permukiman kumuh seluas 3,2 ha. Dengan demikian untuk Tahun 2019 capaian kinerja indikator tersebut sebesar 100.27% melebihi target yang ditetapkan.

Sementara untuk tahun 2020 luas kawasan permukiman tidak kumuh seluas 2459,22 ha atau seluas 97,43% dengan luas kawasan kumuh seluas 64,78 ha. Sehingga untuk Tahun 2020 dengan target indikator 99.80, capaian realisasi sebesar 97,62%. Di Tahun 2020 terjadi penambahan luas kawasan permukiman kumuh seluas 64,78 ha.

13.3. Langkah-langkah yang Dilakukan Dalam Pencapaian Indikator

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya:

1. Pembuatan jalan lingkung dan drainase lingkungan baru,
2. Perbaikan jalan lingkung dan drainase lingkungan rusak,
3. Program skala lingkungan Kotaku 2017-2020 senilai 4,3 Milyar (jalan lingkung, drainase, *septic tank* komunal),
4. Program skala kawasan Kotaku senilai 11,4 Milyar.

13.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa faktor yang membuat keberhasilan dalam pencapaian indikator diantaranya BKM yang baik serta kolaborasi pemerintah kota dalam pembuatan DED. Namun masih dirasakan adanya kekurangan peran serta dari kelompok kerja PKP.

13.5. Alternatif Solusi Pencapaian Indikator

Adapun solusi yang dilakukan sebagai alternatif dalam pencapaian target indikator seperti:

1. Penguatan kelompok kerja (Pokja) PKP dalam perhitungan penangan indikator kumuh disetiap SKPD
2. Pembuatan aplikasi database kumuh dan perhitungan pengurangan kumuh dengan metode partisipatif.

SASARAN III.4 : Peningkatan Kepemilikan Rumah

Sasaran III.4 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kepemilikan Rumah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan jumlah rumah dengan kepemilikan sendiri terhadap jumlah seluruh rumah dikali 100%, atau dapat dilihat melalui rumus berikut

$$\text{Kepemilikan Rumah} = \frac{\text{Jumlah rumah dengan kepemilikan sendiri}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$$

14.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 14.1. Capaian Indikator **Indeks Kepemilikan Rumah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepemilikan Rumah	71.56	34.4	48.07 %

Sumber: Dinas Perkim Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi 2021

Dari data diatas didapatkan informasi bahwa berdasarkan indeks Kepemilikan Rumah yang dihitung dengan membandingkan jumlah rumah dengan kepemilikan sendiri dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah maka didapat Indeks untuk Tahun 2020 sebesar 34,4. Dengan target 71,56% di Tahun 2020 dapat diartikan bahwa diperoleh capaian kinerja sebesar 48,07%.

Artinya baru 34.4% dari yang ditempati oleh pemiliknya sementara yang lainnya ditempati oleh penyewa, menumpang dan lainnya. Data ini mengimplikasikan bahwa penduduk yang tinggal di Kota Bukittinggi belum seluruhnya sanggup untuk membangun rumah dan menempati rumah sendiri. Implikasi lainnya adalah luas lahan Kota yang sudah sangat terbatas untuk mampu menampung atas kebutuhan pembangunan perumahan.

Melalui Data BPS 2020 (Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020), Kepemilikan bangunan adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal atau rumah yang ditempati dilihat dari sisi anggota ruta yang mendiaminya. Terdiri dari milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, rumah bersama dan lainnya. Kepemilikan Rumah / Bangunan di Kota bukittinggi dapat juga dilihat pada gambar dibawah:



Sumber: BPS Kota Bukittinggi 2020/ Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

14.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kepemilikan Rumah** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 14.2. Perbandingan antara **Indeks Kepemilikan Rumah 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indeks Kepemilikan Rumah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	37.14	na
2020	71.56	34.4	48.07 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi 2021

Indikator kinerja ini baru dimunculkan pada tahun 2020 seiring dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Bukittinggi tentang penyesuaian iku melalui Perwako Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perwako Nomor 45 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi, sehingga belum ada data yang kuat dan cukup untuk dijadikan referensi yang kuat. Namun demikian Dinas Perkim Kota Bukittinggi melalui data dan informasi yang disampaikan bahwa indeks kepemilikan rumah di Tahun 2019 sebesar 37,14%. Sementara di tahun 2020 indeks kepemilikan rumah sebesar 34,4% dengan target yang ditetapkan sebesar 71,56% artinya semakin sedikit jumlah rumah yang ditempati oleh pemiliknya. Definisi lain bahwa, semakin banyak jumlah rumah yang dihuni oleh rumah tangga dengan status mengontak, menyewa dan lain sebagainya.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 cenderung turun dari jumlah kepemilikan rumah di Tahun 2019. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi penurunan kepemilikan rumah adalah pandemi Covid-19. Aktifitas pendidikan dan perdagangan yang sempat terhenti membuat kepemilikan rumah pada tahun 2020 menurun.

Selain itu Pemerintah Kota Bukittinggi belum mampu mencapai Indikator kepemilikan rumah yang ditetapkan sebab Indikator Kinerja Utama ini karena belum dijalankan dengan maksimal, baru dilakukan pendataan kepemilikan rumah pada 2 (dua) kelurahan.

14.3. Langkah-langkah yang Dilakukan Dalam Pencapaian Indikator

Hingga saat ini, pendataan rumah dan kepemilikan rumah di Kota Bukittinggi baru diselesaikan lebih kurang 1700 rumah di 2 (dua) kelurahan sebagai salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bukittinggi yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

14.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Secara keseluruhan, pencapaian target indikator ini belum dapat dikatakan berhasil, mengingat belum adanya program/ kegiatan dalam pencapaian sasaran peningkatan kepemilikan rumah di Kota Bukittinggi.

SASARAN III.5 : Meningkatkan Kualitas Air Sungai

Sasaran III.5 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Air** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas air sungai. Indeks Kualitas Air adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survey kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter. Nilai indeks yang semakin tinggi akan menunjukkan kualitas air yang semakin baik pula.

Indeks Kualitas Air = Nilai Pemantauan Kualitas Air

15.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 15.1. Capaian Indikator **Indeks Kualitas Air**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	83.98	47.33	56.47 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

Transformasi nilai Indeks Kualitas Air dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No.82/ 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampek yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Pembobotan indeks kualitas air diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. memenuhi baku mutu = 70
- b. tercemar ringan = 50
- c. tercemar sedang = 30
- d. tercemar berat = 10

Sehingga, dari capaian 56,47 % diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi Indeks Kulaitas Air di Kota Bukittinggi berada pada kriteria Tercemar Ringan.

15.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kualitas Air** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 15.2. Perbandingan antara **Indeks Kualitas Air 3** (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kualitas Air		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	83.98	47.33	56.47 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 sangat jauh dari japaian yang diharapkan.

15.3. Langkah-langkah dalam pencapaian indikator

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan dan pengelolaan,
2. Melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan.

15.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Diantara penyebab keberhasilan pencapaian indikator sebagai berikut:

1. Ketaatan usaha/ kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku,
2. Terjadinya beberapa kasuistik terhadap usaha dan kegiatan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku.

15.5. Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian indikator

Melihat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan langkah-langkah strategis seperti melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan daln pengelolaan terhadap pelaku usaha dan kegiatan serta melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan di Kota Bukittinggi secara teratur dan berkala.

SASARAN III.6 : Meningkatnya Kualitas Udara

Sasaran III.6 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Udara** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara, atau dapat dilihat melalui rumus berikut

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = \text{Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara}$$

83.54

Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Semakin tinggi angka indeks akan menunjukkan kualitas yang semakin tinggi pula. Saat ini indeks standar kualitas udara yang digunakan secara resmi adalah indeks standar pencemaran udara (ISPU). Indeks kualitas udara tahun 2020 adalah 83,54, sebuah angka yang menunjukkan kualitas sedang.

16.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 16.1. Capaian Indikator **Indeks Kualitas Udara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	88.37	83.54	94.53 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

Menghitung Indeks Kualitas Udara adalah dengan menghitung rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan udara dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref eu dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO₂ Ref eu. Sebagai acuan dalam menentukan kualitas udara, hasil nilai Indeks Kualitas Udara diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel : 16.1.1 Klaisifikasi Nilai Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks	Rentang Nilai
Sangat Baik	> 90
Baik	70 < - ≤ 90
Cukup	50 ≤ - ≤ 70
Kurang	30 ≤ - < 50
Sangat Kurang	< 30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Udara Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan capaian nilai 83.54 dapat diklasifikasikan dengan nilai indeks **Baik**.

16.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kualitas Udara** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 16.2 Perbandingan antara **Indeks Kualitas Udara 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indeks Kualitas Udara		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	88.37	83.54	94.53 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

16.3. Langkah-langkah dalam Upaya Pencapaian Indikator

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan dan pengelolaan,
2. Melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan.

16.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Diantara penyebab keberhasilan pencapaian indikator sebagai berikut.

1. Petaanusahaan/ kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku,
2. Terjadinya beberapa kasuistik terhadap usaha dan kegiatan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku.

16.5. Alternatif Solusi yang dilakukan dalam Pencapaian Indikator

Melihat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan langkah-langkah strategis seperti melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan dalam pengelolaan terhadap pelaku usaha dan kegiatan serta melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan di Kota Bukittinggi secara teratur dan berkala.

16.6. Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 16.6. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator **Indeks Kualitas Udara**

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	454.584.050	446.086.742	98.13
Pemantauan Kualitas	98.680.000	98.413.625	99.73

Tanah dan Produksi Biomasa			
Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	16.563.050	15.409.410	93.03
Verifikasi Pengaduan kasus lingkungan hidup	6.266.300	5.922.075	94.51
Pemantauan kualitas lingkungan hidup	79.044.000	75.744.301	95.83
Pelayanan perizinan PPLH	7.703.550	7.267.355	94.34
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	145.033.650	143.321.076	98.82
Penegakan Hukum administrative lingkungan hidup	2.315.400	2.224.000	96.05
Studi kajian usaha/ kegiatan sepanjang	98.978.100	97.784.900	98.79

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

SASARAN III.7 : Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan

Sasaran III.7 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Tutupan Lahan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas tutupan lahan, atau dapat dilihat melalui rumus berikut

Indeks Kualitas Tutupan Lahan = Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas tutupan lahan

17.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 17.1. Capaian Indikator **Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,46	37,11	55,01 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

Indek Kualitas Tutupan Lahan merupakan IKU baru yang dimunculkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020. Penghitungan Indek Kualitas Tutupan Lahan. Target yang ditetapkan dengan nilai 67.46 didapatkan realisasi dengan nilai sebesar 37.11 dengan persentase capaian indikator sebesar 55,01%.

17.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kualitas Tutupan Lahan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 17.2 Perbandingan antara **Indeks Kualitas Tutupan Lahan 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	67.46	37.11	55.01%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 masih jauh dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan hanya mendapatkan nilai 37,11 dengan persentase kinerja sebesar 55,01 %. Untuk tahun 2017-2019 data indeks kualitas tutupan lahan belum tersedia pada instansi terkait karena memang belum diadakan penghitungan secara sistematis oleh SKPD terkait.

17.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Pemerintah Kota telah berupaya untuk merealisasikannya. Namun karena keterbatasan lahan untuk RTH pada RTRW yang juga dilatarbelakangi oleh kondisi dan luas kota Bukittinggi selama ini, maka indeks kualitas tutupan lahan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena tidak mungkin lagi membuka lahan untuk tujuan penghijauan karena sudah ditentukan secara jelas. Namun masih ada langkah yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan adanya fungsi ruang terbuka hijau yang cukup. Hal tersebut adalah dengan penggalakkan dan mengoptimalkan upaya penanaman pepohonan di lahan yang tersedia termasuk pohon pelindung diberbagai titik di Kota Bukittinggi dilakukan secara terus menerus dan masif.

17.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Kota Bukittinggi sebagai wilayah administratif yang terus berkembang di berbagai sektor kehidupan sangat berdampak terhadap jumlah pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan menjadi bangunan maupun sebagai tempat usaha dan kegiatan masyarakat terus saja terjadi. Namun dalam hal ini penataan dan penertiban menjadi langkah penting Pemerintah dalam mengatur kualitas tutupan lahan di Kota Bukittinggi.

17.5. Program/ kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 17.5. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator **Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Program/ Kegiatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Persentase Capaian
Pemeliharaan rutin taman dalam kota	1.901.696.067	1.823.324.560	95.88 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

SASARAN III.8 : Peningkatan Pelayanan Transportasi

Sasaran III.8 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan** yang secara defenisi operasional dapat Persentase panjang jalan yang dilalui angkutan umum jalan terhadap panjang total panjang jalan. Dari data dan informasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bahwa total panjang jalan yang menjadi kewenangan Kota adalah sepanjang 180,169 km, sementara total panjang jalan yang dilalui oleh angkutan umum adalah sepanjang 155 km. Jadi didapatkan Indeks Aksebilitas Angkutan Umum Jalan adalah 86,03% atau dapat dilihat melalui rumus berikut

$$\begin{aligned} \text{Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan} &= \text{Persentase panjang} \\ &\text{jalan yang dilalui angkutan umum/ panjang total panjang jalan} \times 100\% \\ &= \frac{155 \text{ km} \times 100\%}{180,169 \text{ km}} \\ &= \mathbf{86,03\%} \end{aligned}$$

18.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 18.1. Capaian Indikator Kinerja **Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80%	86.03%	107.53%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari total 180,169 km jalan kota bukittinggi yang dilalui oleh kendaraan angkutan umum adalah sepanjang 155 km. sehingga indeks aksesibilitas angkutan umum jalan dari target 80% yang ditetapkan untuk Tahun 2020 sudah didapatkan realisasi sebesar 86.03%. untuk capain kinerja indikator tersebut sudah melampaui target ditetapkan dengan capaian sebesar 107.53%.

Sementara masih terdapat 13.97% jalan di Kota Bukittinggi yang belum dilalui oleh kendaraan angkutan umum atau sepanjang 25,169 km.

18.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 18.2 Perbandingan antara **Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	80	86.03%	107.53%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 didapatkan persentase capaian kinerja indikator sebesar 86.03%. Angka 86.03% merupakan jumlah panjang jalan di Kota Bukittinggi yang dilalui oleh kendaraan angkutan umum yakni sepanjang 155 Km. Jumlah panjang jalan yang dilalui kendaraan angkutan umum ini sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Umum dalam Kota Bukittinggi.

18.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini diampu oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi telah memberikan pelayanan yang baik dan transparan bagi pelaku usaha dan kegiatan angkutan umum di Kota Bukittinggi serta melakukan pemungutan retribusi angkutan umum bagi seluruh moda angkutan transportasi umum yang masuk ke Kota Bukittinggi,
2. Selain itu, Dinas Perhubungan secara berkala melakukan sosialisasi kepada seluruh pengusaha angkutan umum guna peningkatan layanan serta tertib dalam berlalulintas.

18.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Dengan capaian yang lebih 100% dapat disimpulkan bahwa kinerja terkait Indikator ini sangatlah baik. Hal ini dicapai dikarenakan adanya upaya yang serius dalam hal pengawasan dan pembinaan kepada pengusaha angkutan umum dan tidak terkecuali terhadap pengusaha angkutan barang. Disamping itu keberhasilan ini disebabkan oleh adanya upaya yang terus menerus dari pemerintah terutama SKPD dalam menata dan merekayasa lalulintas dalam kota sehingga semua ruas jalan dapat dilalui oleh angkutan umum. Kondisi ini tentunya juga sangat menunjang kelancaran mobilitas penduduk Kota Bukittinggi.

18.5. Alternatif Solusi yang dilakukan dalam Pencapaian Target

Upaya penegakan aturan secara baik tidak terlepas dengan diaplikasikannya seluruh peraturan perundang-undangan pada urusan perhubungan. Aturan mengikat yang diterapkan mulai dari Undang-undang Perhubungan hingga peraturan daerah selalu menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam bertindak. Hal ini terus dipacu dan diaplikasikan guna meningkatkan layanan angkutan umum bagi masyarakat serta memberikan imbas balik terhadap usaha angkutan umum baik perorangan maupun perusahaan di Kota Bukittinggi.

Dalam masa mencegah Covid -19, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi juga melakukan pengawasan terhadap layanan transportasi angkutan umum dengan terus menerapkan protocol kesehatan terhadap pengguna dan penyedia layanan. Baik sopir dan penumpang diharuskan menggunakan masker serta jumlah penumpang moda transportasi dilakukan pembatasan. Tidak hanya bagi moda transportasi umum, penerapan protokol kesehatan juga dilakukan pada moda transportasi umum daring baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua).

18.6 Program atau Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 18.6. Program/ kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran Tahun 2020	%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas perhubungan	273,039,460	270,416,675	99%
Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu lalulintas	273,039,460	270,416,675	99%
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor	572,164,400	412,837,991	72%
Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	572,164,400	412,837,991	72%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2,124,721,762	1,703,180,882	80%
Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	2,124,721,762	1,703,180,882	80%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

Sasaran III.8 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan jumlah kejadian kecelakaan dalam 1 (satu) tahun, atau dapat dilihat melalui rumus berikut

$$\text{Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan} = \text{jumlah kejadian kecelakaan dalam 1 (satu) tahun}$$

19.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 19.1. Capaian Indikator **Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	170	59	134.7 %

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari target hanya 170 kasus kecelakaan pada tahun 2020, hanya terjadi kasus kecelakaan sebanyak 59 Kasus artinya capaian kinerjanya adalah 134.7%. Angka ini menunjukkan jumlah kecelakaan kendaraan roda 4 maupun dua 2 atau yang lainnya baik berupa kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang melibatkan pihak lain.

19.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 19.2 Perbandingan antara **Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	200	56	128 %
2018	190	64	133.6 %
2019	180	85	147.2 %
2020	170	59	134.7 %

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa tahun 2020 telah terjadi penurunan tingkat kecelakaan lalulintas. Pada tahun 2020 tingkat kecelakaan lalulintas sebanyak 59 kejadian. Cukup jauh dibawah target yang ditetapkan dengan perkiraan kejadian kecelakaan dengan angka 170. Sementara, dari data BPS Kota Bukittinggi (Statistik Kota Bukittinggi 2020) disampaikan Banyaknya Tabrakan/ kecelakaan lalulintas di Kota Bukittinggi sebagai berikut:

Tabel 19.2.1. Jumlah Kejadian Kecelakaan DI Kota Bukittinggi

Tahun	Jlh. Kejadian	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
2015	183	37	30	214
2016	202	46	43	202



2017	148	18	22	177
2018	181	39	10	221
2019	221	39	3	256

Sumber: BPS Kota Bukittinggi (statistik Kota Bukittinggi 2020)

19.3. Langkah-Langkah Dalam Pencapaian Indikator

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menekan jumlah tingkat kecelakaan laulintas sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi secara intens melakukan koordinasi dengan pihak terkait atau berkompeten seperti Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jasa Raharja serta pelaku usaha transportasi,
2. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terus berupaya menyediakan fasilitas pendukung perlengkapan jalan Kota Bukittinggi,
3. Pemerintah Kota Bukittinggi juga mengawal kendaraan umum orang dan barang untuk terus melakukan pengujian laik uji kendaraan secara berkala.
4. Adanya peningkatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap upaya keselamatan berlalulintas

19.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Secara keseluruhan capaian kinerja yang sangat baik pada tahun 2020 disebabkan oleh upaya yang dilakukan oleh Pemko Bukittinggi terutama Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam meningkatkan pelayanan di bidang lalu lintas. Disamping itu kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang sudah semakin meningkat merupakan penyebab terhadap menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memberikan layanan transportasi yang baik bagi masyarakat, namun dalam aplikasinya masih ditemui beberapa kendala diantaranya:

1. Masih didapati kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi aturan berlalulintas,
2. Masih minimnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam memahami akan keselamatan berkendara dan menggunakan fasilitas jalan.

19.5. Alternatif Solusi Mencapai Target Indikator

Mengatasi berbagai kendala yang terjadi Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan infrastruktur baik sarana maupun prasarana lalulintas,
2. Melakukan sosialisasi berkala tentang keselamatan di jalan,

3. Menjalankan program-program pemerintah yang berkaitan dengan keselamatan untuk diaplikasikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

19.6. Program atau Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 19.6. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator **Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran tahun 2020
Pengendalian dan pengamanan lalulintas	9,122,500	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan himbauan pemerintah untuk tidak melakukan keramaian dan rapat dilaksanakan dengan daring
Forum LLAJ	9,122,500	dengan daring

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2021

TUJUAN IV : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERKOTAAN YANG BERKUALITAS

SASARAN IV.1 : Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer

Sasaran IV.1 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pertumbuhan PDRB Sektor Primer** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku untuk lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Pertambangan dan Penggalian.

20.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 20.1. Tabel Capaian Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Primer**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	3,31	-31,084	-9.30%

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

Kota Bukittinggi adalah kota yang tumbuh dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan kesehatan. Sudah barang tentu sektor tersebut tersebut menjadi sektor andalan bagi Kota Bukittinggi. Pertumbuhan PDRB disektor primer pada Kota Bukittinggi memang tidak menjadi andalan. Usaha dan kegiatan pertanian dengan keterbatasan lahan tidak dapat terekspose secara signifikan termasuk kehutanan, perikanan, pertambangan serta galian yang dapat dikatakan tidak ada.

Pertumbuhan PDRB Sektor Primer didasarkan atas harga berlaku untuk lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Pertambangan dan Penggalian.

Secara garis besar pada sektor primer ini, kontribusi pertanian tidak memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, begitu pula dengan sektor pertambangan dan penggalian, dikarenakan di Kota Bukittinggi tidak ada aktivitas penambangan dan penggalian, maka sektor ini tidak memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pembentukan PDRB Kota Bukittinggi.

20.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Pertumbuhan PDRB Sektor Primer** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 20.2 Perbandingan antara **Pertumbuhan PDRB Sektor Primer 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	3,41	3,52	103 %
2018	3,24	2,42	75 %
2019	3,18	3,00	94 %
2020	3,31	-31,084	-9.30%

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

20.3. Langkah-langkah yang Dilakukan Dalam Pencapaian Indikator

1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi secara nasional dan propinsi pada tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah,
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholders pemangku urusan perekonomian terkait perencanaan pembangunan ekonomi.

20.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab dari kegagalan pencapaian indikator adalah masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait Pembangunan Ekonomi Sektor Primer.

20.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait pembangunan ekonomi sektor primer.

20.6 Program atau kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Tabel 20.6. Program/Kegiatan Penunjang Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Primer**

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran 2020	Persentase
Program Perencanaan			

Pembangunan Ekonomi	Bidang			
Koordinasi Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Bidang	36,788,705	33,356,855	90,6 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

SASARAN IV.2 : Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder

Sasaran IV.2 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku untuk lapangan usaha industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Konstruksi.

21.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 21.1. Capaian Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6,30	-2,6	-41.26 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

Sektor Sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi seperti pada manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Dalam proses produksinya industri pada sektor ini umumnya mengkonsumsi energi dalam cukup besar, memerlukan pabrik dan mesin serta menghasilkan limbah.

Seiring dengan Sektor primer maka sektor sekunder ini mengalami penurunan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, berkembangnya industri 4.0 sehingga berpengaruh terhadap pengembangan industri di daerah-daerah. Industri pada Kota Bukittinggi lebih bersifat industri ringan yaitu industri yang mengolah barang siap pakai untuk dikonsumsi, seperti industri makanan dan industri pakaian jadi.

21.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 21.2 Perbandingan antara **Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	6.15	9.9	160.97 %
2018	6.20	4.85	78.22 %



2019	3.25	3.56	109.5 %
2020	6.30	-2.6	-41.26 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 sangat jauh dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir capaian kinerja tahun 2020 merupakan capaian kinerja dengan persentase terendah, seiring dengan pandemi Covid 19 yang melanda Negara Indonesia yang secara regional juga dipengaruhi oleh perekonomian dunia secara global.

21.3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator

1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi secara nasional pada tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah,
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholders pemangku urusan perekonomian terkait perencanaan pembangunan ekonomi sektor sekunder.

21.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait Pembangunan Ekonomi Sektor sekunder.

21.5. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait pembangunan ekonomi sektor sekunder.

21.6 Program atau kegiatan penunjang indikator

Tabel 21.6 Program/ Kegiatan Penunjang Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder**

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran 2020	Persentase
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	36,788,705	33,356,855	90,6

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

SASARAN IV.3 : Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier

Sasaran IV.3 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan jasa lainnya

22.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 22.1. Capaian Indikator Kinerja **Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9,57	-2.9	-30,3 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

22.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 22.2 Perbandingan antara **Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	9,57	10.05	105 %
2018	9,57	7.9	82.54 %
2019	9,57	9.4	98.22 %
2020	9,57	-2.9	-30,3 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

Sektor tersier merupakan sektor yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Sektor tersier ini merupakan sektor yang sangat mempengaruhi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Khusus pada Tahun 2020 ini, sektor tersier mengalami penurunan yang cukup drastis karena dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19.

22.3. Langkah-langkah dalam pencapaian indikator

1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi secara nasional pada tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholders pemangku urusan perekonomian terkait perencanaan pembangunan ekonomi sektor tersier.

22.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Dari capaian indikator kinerja yang didapatkan pada Tahun 2020 sangat dirasakan bahwa kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait Pembangunan Ekonomi Sektor tersier.

22.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Untuk itu kiranya Pemerintah Kota Bukittinggi mengedepankan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait pembangunan ekonomi sektor tersier untuk pencapaian target kinerja tahun berikutnya.

22.6 Program atau Kegiatan Penunjang Indikator

Tabel 22.6. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier**

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran 2020	Persentase
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	36,788,705	33,356,855	90,6

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

SASARAN IV.4 : Penurunan Kemiskinan

Sasaran IV.4 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Tingkat Kemiskinan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase penduduk yang berad dibawah Garis Kemiskinan, atau dapat dilihat melalui rumus berikut:

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk kota bukitinggi}}$$

Kemiskinan adalah suatu keadaan keadaan ata ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,tempat berlindung, pendidikan, kesehatan. Kemiskinan

dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

23.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 23.1. Capaian Indikator **Tingkat Kemiskinan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kemiskinan	3.35	4.45	67.17 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

Pandemi virus corona Covid 19 berpotensi membuat angka kemiskinan meningkat. Melambatnya perekonomian yang ditandai dengan sektor perdagangan dan jasa yang pertumbuhannya melambat, tinggi angka pemutusan hubungan kerja, serta melumpuhnya pertumbuhan sector-sektor lain. Hal ini sangat berkontribusi terhadap angka kemiskinan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kemiskinan dibanding tahun 2019 dimana pada tahun tersebut masih terdapat 4.6 % penduduk Kota Bukittinggi yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa 3,35% penduduk Kota Bukittinggi ditargetkan hidup dibawah garis kemiskinan. Namun kenyataannya masih terdapat 4,45% penduduk Kota Bukittinggi yang hidup dibawah garis kemiskinan di Tahun 2020.

Capaian kinerja dalam penurunan angka kemiskinan ini adalah 67.17% sebuah capaian yang masih kita harapkan jauh lebih tinggi dari yang masih dicapai. Harusnya telah terjadi penurunan angka kemiskinan jika dihubungkan dengan berbagai upaya yang telah Pemerintah Kota Bukittinggi. Namun kondisi pandemi Covid 19 menimbulkan akibat yang luar biasa terhadap penurunan pendapatan masyarakat sehingga meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan namun penurunan tersebut tidak signifikan dan tidak seimbang dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah dan stakeholder lainnya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi.

Angka kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS adalah angka kemiskinan makro yang dihitung dengan menggunakan sampel. Data yang dipakai untuk rumah tangga miskin adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan merupakan hasil pendataan oleh Kota Bukittinggi terhadap rumah tangga dan keluarga miskin yang ada di Kota Bukittinggi. Dalam program intervensi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kota Bukittinggi memadukan kedua data yang dihitung dengan metodologi yang berbeda ini.

23.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Tingkat Kemiskinan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 23.2 Perbandingan antara **Tingkat Kemiskinan** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Kemiskinan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	3,37	5,35	41,25 %
2018	3,5	4,92	57,62 %
2019	3,35	4,60	62,69 %
2020	3,35	4,45	67,17 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 paling tinggi dibandingkan capaian kinerja 3 tahun sebelumnya. Namun demikian jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tercatat pada angka 6.010 orang dengan perbandingan jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 132.723 orang di Tahun 2020.

Penurunan angka kemiskinan adalah kejadian yang cukup ironis terkait dengan kemiskinan akibat wabah covid-19 yang memicu penurunan pendapatan pada seluruh kalangan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik 2020 memang tingkat kemiskinan turun, hal ini sinkron dengan menurunnya jumlah RT miskin berdasarkan pendataan Kementerian Sosial pada DTKS dimana pada Bulan Oktober 2020 RT Miskin di Bukittinggi adalah sebanyak 4.977 sementara pada Bulan Januari 2020 adalah sebanyak 5.472.

23.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

1. Penggunaan Data BDT dengan pemanfaatannya yang optimal sehingga akan mendorong program intervensi penanggulangan kemiskinan tersebut tepat sasaran,
2. Mengidentifikasi penyebaran dengan pendekatan kelurahan,
3. Membatasi arus migrasi masuk terhadap warga kurang mampu dari daerah lain,
4. Mengurangi beban Rumah Tangga Miskin melalui Bantuan Sosial dan bantuan lainnya,
5. Pemberdayaan masyarakat miskin lewat pengembangan kampung KB dan KUBE-KUBE dan menggerakkan Dasa Wisma,
6. Mengoptimalkan program/kegiatan yang dirancang untuk penanggulangan kemiskinan.

23.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

1. Terjadi Pandemi Covid 19 tahun 2020 yang mengakibatkan menurunnya pendapat masyarakat
2. Pandemi Covid 19 tahun 2020,
3. Baru pada tatanan pengupasan konsep penanggulangan kemiskinan, tapi belum berbicara tentang kegiatan taktis dalam penanggulangan kemiskinan tersebut,

4. Kemiskinan masih dianggap kriteria sektoral, sehingga belum menjadi perjuangan bersama melawan kemiskinan oleh semua unsur dan lembaga baik pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Bukittinggi,
5. Belum optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan yang dirancang untuk penanggulangan kemiskinan.

23.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

1. Semua elemen atau stakeholder bergerak menanggulangi kemiskinan
2. Optimalisasi program-program yang dirancang untuk penanggulangan kemiskinan
3. Kurangi beban rumah tangga miskin dengan mengoptimalkan bantuan sosial dan bantuan lainnya
4. Program pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa keluar dari kemiskinan

TUJUAN V : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

SASARAN V.1 : Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Sasaran V.1 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Harapan Lama Sekolah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, atau dapat dilihat melalui rumus berikut:

Harapan Lama Sekolah	=	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang
		14,97 tahun





24.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 24.1 Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Harapan Lama Sekolah	14.9	14,97	100,06%

Sumber : BPS Sumatera Barat 2021

Dari laporan bulanan data sosial ekonomi Provinsi Sumatera Barat Januari 2021, angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2020 tercatat 14.97. Sementara pada Tahun 2019 angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi tercatat 14.96. Angka Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan yang tidak signifikan sebesar 0,1 saja.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas variabel ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2016, Harapan Lama Sekolah yang ditargetkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 14,7 tahun, dan terealisasi sebesar 14,92 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 79%. Artinya, setiap anak pada usia tertentu pada tahun 2016, akan memiliki harapan untuk bersekolah pada umur tertentu selama 14,92 tahun, atau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi pada semester 6.

Capaian ini didukung dengan keberadaan sekolah mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan perguruan tinggi yang ada di Bukittinggi sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar/ MI negeri dan swasta sebanyak 65 sekolah
2. SMP/ MTs negeri dan swasta sebanyak 18 sekolah
3. SMA/MA/SMK negeri dan swasta sebanyak 29 sekolah
4. Perguruan tinggi negeri dan swasta sebanyak 22 perguruan tinggi

Pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sekolah merupakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, sementara untuk jajaran pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, baik tingkat kota maupun provinsi. Perguruan tinggi negeri sesuai kewenangannya dikelola oleh pemerintah, sementara keberadaannya sangat berpengaruh pada harapan lama sekolah di Bukittinggi. Karena itu program Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini adalah dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi.

24.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Harapan Lama Sekolah** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 24.2 Perbandingan antara **Harapan Lama Sekolah** Tahun 2019 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Harapan Lama Sekolah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	14.94	14.94	100 %
2018	14.95	14.95	100 %
2019	14.96	14.95	100,06 %
2020	14.9	14.97	100,46 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan perlunya pendidikan bahkan sampai ke jenjang yang paling tinggi.

24.3. Langkah-langkah yang Dilakukan Dalam Pencapaian Indikator

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari komitmen Walikota beserta jajarannya untuk senantiasa memberikan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan di Kota Bukittinggi. Hal ini tentu saja juga tidak terlepas dari peran pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya dan selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan di Kota Bukittinggi. Dan tentunya kesadaran dan kebutuhan yang sangat tinggi dari masyarakat akan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dituangkannya Pendidikan sebagai Visi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

24.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Dalam upaya efisiensi sumber daya, Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan memegang peran yang sangat penting. Hal ini tentu saja juga tidak terlepas dari peran pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya dan selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan di Kota Bukittinggi.

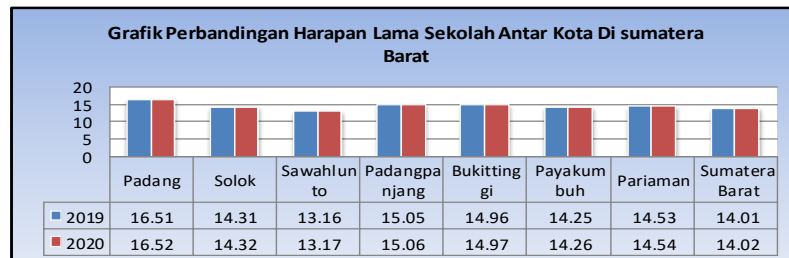
Kesadaran penduduk terutama orang tua murid yang sangat tinggi di Kota Bukittinggi sangat berkontribusi terhadap tingginya capaian kinerja indikator angka rata-rata harapan lama sekolah. Disamping itu komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengalokasi anggaran untuk bidang pendidikan minimal 20% dari Total APBD merupakan salah satu faktor yang mendorong terhadap capaian kinerja angka harapan lama sekolah.

24.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Walupun dalam pencapaian indikator harapan lama sekolah tidak ditemui kendala yang berarti, beberapa program penunjang dilakukan dalam pencapaian indikator harapan lama sekolah ini diantaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Program dan kegiatan penunjang pendidikan dengan telah dialokasikannya lebih dari 20% APBD untuk penunjang pendidikan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, disamping cukup besarnya dana transfer daerah dari APBN untuk pendidikan. Hal ini tergambar dari besarnya anggaran untuk pendidik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu sebesar Rp 186.982.002.574,-

24.6. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah dengan Kota Se Sumatera Barat

Grafik 24.6 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Di Sumbar



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Barat 2021

Setelah Kota Padangpanjang, Kota Bukittinggi berada pada urutan kedua Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 sebesar 14,96 antar Kota di Provinsi Sumatera Barat. Angka Harapan Lama Sekolah tidak bergerak naik dengan signifikan pada tahun 2020 yang hanya naik 0,1 poin menjadi 14,97.

Sasaran V.1 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Angka Rata Rata Lama Sekolah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal, atau dapat dilihat melalui rumus berikut:

Angka Rata-rata Lama Sekolah	=	Jumlah Tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal
	=	11.32 Tahun



25.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 25.1. Capaian Indikator Angka rata-rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka rata-rata Lama Sekolah	11.33	11.33	100%

Sumber : BPS Sumatera Barat 2021

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Kota Bukittinggi pada tahun 2020 sebesar 11,33 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Bukittinggi yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,33 tahun atau hampir menamatkan kelas XII.

25.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Angka Rata Rata Lama Sekolah** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 25.2 Perbandingan antara **Angka Rata Rata Lama Sekolah 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Angka Rata Rata Lama Sekolah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	11.3	11.30	100 %
2018	11.31	11.31	100 %
2019	11.32	11.32	100 %
2020	11.33	11.33	100 %

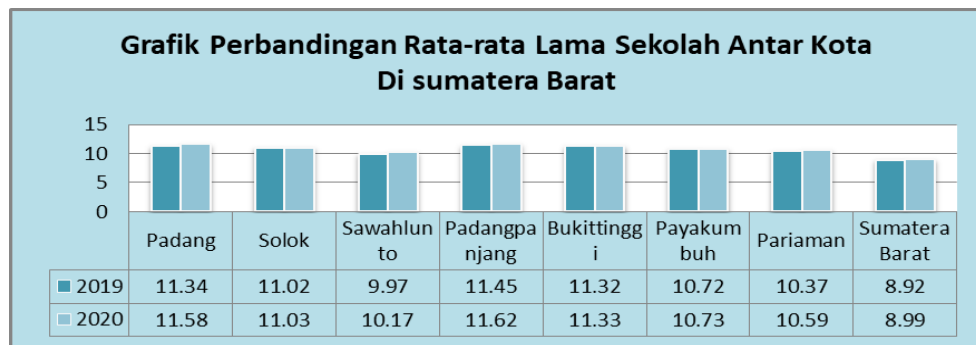
Sumber: BPS Sumatera Barat 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Artinya secara rata-rata, dari tahun ke tahun minat dan keinginan masyarakat Kota Bukittinggi untuk melanjutkan pendidikan selaras dengan target indikator yang ditetapkan.

25.3. Langkah-langkah dalam pencapaian indikator

Salah satu visi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah menjadikan Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan telah diwujudkan diantaranya melalui pengalokasian dana yang cukup besar untuk menunjang sektor ini. Semakin tingginya capaian rata-rata lama sekolah di Kota Bukittinggi pada tahun 2020 menunjukkan minat dan keinginan masyarakat Kota Bukittinggi yang semakin tinggi untuk melanjutkan dan meningkatkan pendidikan formal. Hal ini seiring dengan pembenahan di sektor pendidikan, pembenahan sarana dan prasarana serta kualitas mutu lainnya. Pemerintah Kota Bukittinggi selalu mendorong agar rapor mutu pendidikan selalu meningkat dan mencapai delapan standar mutu pendidikan.

Grafik 25.3 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Antar Kota di Sumatera Barat



Sumber : BPS Sumatera Barat 2021

25.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Dalam mendorong agar capaian indikator rata-rata lama sekolah ini semakin meningkat harus dilakukan berbagai pembenahan baik sarana, prasarana serta kualitas mutu pendidikan. Disamping anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pendidikan setiap tahunnya mencapai Rp.80.306.857.037,00 yang bersumber dari APBN maupun APBD. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di sektor pendidikan formal. Dari pagu anggaran sebesar Rp 80.306.857.037,00 terealisasi anggaran sebesar Rp 76.613.330.222,00 atau sekitar 95%.

Dengan realisasi anggaran sebesar 95% dari pagu yang disediakan, telah dapat dicapai capaian kinerja sebesar 102,50%. Hal ini berarti telah dapat dilakukan efisiensi anggaran namun dengan tetap memperhatikan kualitas pendidikan di Kota Bukittinggi secara keseluruhan.

25.5. Solusi dalam pencapaian indikator

Adapun program penunjang untuk pencapaian indikator ini diantaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Program dan kegiatan penunjang pendidikan dengan telah dialokasikannya lebih dari 20% APBD untuk penunjang pendidikan tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, disamping cukup besarnya dana transfer daerah dari APBN untuk pendidikan.

SASARAN V.2 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran V.2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Usia Harapan Hidup** yang secara defenisi operasional dapat diartikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

26.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 26.1 Capaian Indikator **Usia Harapan Hidup**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Usia Harapan Hidup	74.52	74.38	99,81%

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Barat 2021

26.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Usia Harapan Hidup** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 26.2. Perbandingan antara **Usia Harapan Hidup** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Usia Harapan Hidup		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	73,69	73,69	100 %
2018	73,91	73,91	100 %
2019	74,22	74,22	100 %
2020	74.52	74.38	99.81 %

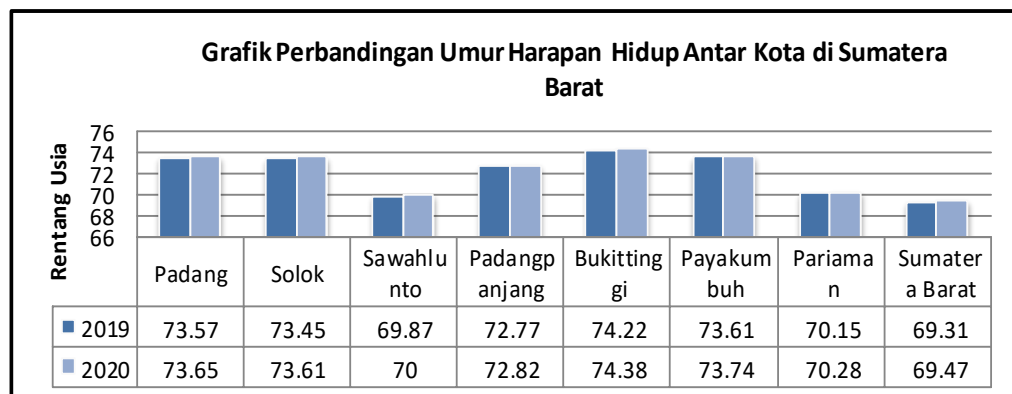
Sumber : BPS Propinsi Sumatera Barat 2021

26.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan organisasi dengan memberdayakan sumber daya manusia, pemantapan perencanaan monitoring dan evaluasi serta peningkatan manajemen kesehatan masyarakat.
2. Melaksanakan upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Promosi yang dilakukan menggunakan metoda dan media yang lebih efektif yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. Peningkatan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak Lintas Sektor dan Lintas Program yang terlibat langsung dengan program kesehatan serta stakeholder dan unsur masyarakat.
4. Program dan kegiatan kesehatan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Grafik 26.3 Grafik Perbandingan UHH Antar Kota di Sumatera Barat



Sumber : BPS Sumatera Barat 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa umur harapan hidup penduduk di Kota Bukittinggi adalah yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Propinsi Sumatera Barat. Hal ini mengidentifikasi bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kota Bukittinggi pun lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pada Kabupaten/ kota lain tersebut. Hal ini disebabkan oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat serta tingginya perhatian pemerintah terhadap kesehatnya penduduknya. Perbandingan Umur Harapan Hidup sejalan dengan dijadikannya kesehatan sebagai sektor penting di Kota Bukittinggi.

26.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

1. Adanya kebijakan pimpinan yang jelas dan terukur dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
2. Adanya komitmen tenaga kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja.
3. Puskesmas sudah terakreditasi paripurna, utama dan madya

Adapun dari kondisi yang ada membuat pencapaian indikator tidak maksimal diantaranya dipengaruhi oleh Pandemi Covid 19 pada tahap awal berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan, namun setelah adanya regulasi dari Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Daerah pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

26.5. Alternatif Solusi dalam pencapaian indikator

Diantara alternatif solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Kesehatan dalam pencapaian indicator sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring evaluasi program dan kegiatan
2. Meningkatkan kerjasama dengan Lintas Sektor dan Lintas Program terkait
3. Refocusing program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

SASARAN V.3 : Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas

Sasaran V.3 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indek Pemberdayaan Gender** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

27.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 27.1 Capaian Indikator **Indek Pemberdayaan Gender**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indek Pemberdayaan Gender	73.84	60.99	82.59

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2021

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 belum rilis. Sementara untuk indeks pemberdayaan gender pada **tahun 2019 berapa pada angka 60,99**. Indeks Pemberdayaan Gender berfokus untuk melihat sejauh mana Kesetaraan Gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi (menitikberatkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan dan aksibilitas terhadap sumber daya ekonomi).

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender antara lain :

1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi dari Tahun 2017 s/d 2020 tetap 8%, artinya dari 25 orang anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019 – 2024, terdapat 2 orang yang perempuan. Sesuai dengan Undang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat telah telah mengamanatkan kuota 30%, namun jumlah perolehan kursi yang sekarang tetap masih belum mencapai 30%. Persentase 30% perempuan di DPRD merupakan jumlah minimal agar mampu mempengaruhi kebijakan sosial terutama terkait dengan kesejahteraan perempuan.

Perempuan di parlemen seringkali tidak berada di posisi strategis sebagai penentu kebijakan. Dengan sedikitnya perempuan yang duduk di Badan Legislasi hingga tidak banyak berkiprah dalam proses pembuatan kebijakan terkait perbaikan kebijakan sosial terutama yang terkait dengan kesejahteraan perempuan dan anak serta perempuan banyak diposisikan sebagai objek pembangunan, dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahteraannya terabaikan.



2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Kesetaraan Gender adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dari lingkungan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang merupakan angkatan kerja. Artinya, jumlah perempuan yang memperoleh kesempatan kerja separuh dari jumlah seluruh perempuan usia kerja yang ada di Kota Bukittinggi.

Perbaikan berbagai indikator ketenagakerjaan seperti meningkatnya partisipasi kerja perempuan dan penurunan pengangguran selama satu dekade terakhir, juga diikuti dengan peningkatan persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional. Selain persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional, indikator pemberdayaan gender lain yang juga meningkat adalah komposisi pegawai negeri sipil (PNS). Persentase jumlah ASN perempuan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Dari 2.644 jumlah PNS yang ada di Kota Bukittinggi, terdapat 1.635 perempuan (61,84%) dan laki-laki sebanyak 1.009 orang laki-laki (38,15%). Dengan demikian jumlah PNS perempuan lebih banyak dibanding dengan PNS laki laki.

Meski demikian, peran perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan relatif masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari persentase pejabat struktural laki-laki dan perempuan yang masih timpang. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin, 2020. Dari 564 orang pejabat struktural di Kota Bukittinggi, terdapat 302 orang perempuan dan 262 orang laki laki. Namun dari beberapa pejabat struktural perempuan lebih banyak pada posisi pejabat eselon IV yaitu 257 orang perempuan dan laki laki sebanyak 183 orang. Sedangkan pada eselon III (laki-laki 59 dan perempuan 42 orang) dan eselon II (laki- laki sebanyak 20 orang, dan perempuan 3 orang). Ini artinya pejabat laki laki lebih banyak berada pada Top Manajer yaitu pejabat pengambil keputusan. Sedangkan PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, banyak diduduki orang perempuan yaitu 783 orang perempuan dan 172 orang laki laki.

Perempuan yang duduk di lembaga yudikatif di Kota Bukittinggi dapat tergambar sebagai berikut. Di Kejaksaan pejabat struktural, dari 9 orang pejabat struktural, lebih banyak diduduki oleh laki laki (5 orang) dibanding perempuan dan perempuan sebanyak 4 orang, dan di pengadilan jumlah jumlah hakim laki-laki (20 orang) daripada perempuan sebanyak 15 orang. Sedangkan pada jajaran kepolisian, jumlah pegawai laki-laki (461 orang) lebih banyak dari polisi perempuan (40 orang). Ini menunjukkan bahwa sentifitas gender terhadap penegak hukum masih rendah, yang mengakibatkan kasus-kasus yang menimpa perempuan kurang ditangani secara optimal.

Selain masalah rendahnya jumlah pejabat pengambil keputusan PNS perempuan, terdapat beberapa tantangan lain yang harus dihadapi dan membutuhkan penanganan dari berbagai

pemangku kepentingan terkait, diantaranya adalah keterlibatan perempuan dalam posisi strategis dan ketimpangan upah yang masih saja terjadi. Selanjutnya, masalah yang umum terjadi pada pekerja perempuan yang telah menikah adalah kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan ketika memiliki anak, kemudian masuk kembali ke pekerjaan tersebut ketika sudah siap. Hal ini tentu akan memengaruhi senioritas dan proses promosi untuk perempuan yang bekerja tersebut

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Pertumbuhan IDG setiap tahunnya cenderung lambat, meski demikian, capaian ini tetap menjadi sinyal positif adanya perbaikan keadaan pemberdayaan gender di Bukittinggi.

27.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indek Pemberdayaan Gender** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 27.2 Perbandingan **Indeks Pemberdayaan Gender 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indek Pemberdayaan Gender		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	71.84	62.11	86.45
2018	72.84	62.19	85.37
2019	73.84	60.99	82.59
2020	74.84	-	-

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2019 turun dari tahun sebelumnya. Menunggu rilis angka **Indek Pemberdayaan Gender** tahun 2020, diharapkan realisasi dari target indikator mampu melewati angka realisasi tahun 2019.

27.3. Langkah-langkah dalam pencapaian indikator

a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi, masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-undang No. 10/ 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD.

Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya rendahnya kemauan dan kemampuan perempuan untuk terlibat dalam politik atau belum munculnya kesadaran perempuan dalam



berpolitik. Padahal undang-undang sudah memberikan peluang yang sangat besar agar perempuan mempunyai keterlibatan dalam berpolitik.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Pembinaan terhadap organisasi perempuan yang ada sebanyak 25 organisasi
2. Pembinaan dan memfasilitasi pengurus partai politik perempuan dalam meningkatkan kualitas
3. Pembinaan terhadap ibu rumah tangga dalam bentuk kegiatan sekolah keluarga
4. Bekerjasama dengan anggota DPRD Kota Bukittinggi yang perempuan dalam wadah organisasi kemasyarakatan (PUSPA) dalam pembinaan kepada masyarakat

b. Perempuan sebagai tenaga profesional

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam birokrasi salah satunya dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ini mengatur pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi serta mempertimbangan integritas dan moralitas. Penerapan aturan ini diharapkan dapat membuka peluang yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan untuk menduduki suatu jabatan tertentu

Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong kesetaraan gender dari sisi ketenagakerjaan menampakkan hasil yang cukup menggembirakan. Berbagai indikator ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perempuan semakin berkontribusi dalam pasar tenaga kerja. Meski capaian beberapa indikator tersebut belum dapat menyamai laki-laki, namun dalam perkembangannya indikator tenaga kerja perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi kesetaraan gender di Kota Bukittinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Proses modernisasi telah berhasil mengubah berbagai bidang kehidupan, termasuk ketenagakerjaan. Kini, banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan dari dan dimana saja. Hal ini menjadi peluang bagi perempuan di Kota Bukittinggi, untuk dapat terjun ke pasar tenaga kerja. Kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terjadi terutama di Kota Bukittinggi. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi. Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas Pendidikan.

Meski telah mengalami perbaikan kualitas pendidikan, tenaga kerja perempuan masih menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan karena mayoritas pekerja perempuan berada di sektor yang memang secara budaya dianggap sebagai “pekerjaan perempuan” misalnya pada sektor jasa dengan upah rata-rata yang relatif rendah. Dinas P3APPKB bekerjasama dengan Dinas Pasar dan Perdagangan, Dinas Pariwisata serta Dinas PM, PTSP, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Bukittinggi secara bersama dan terpadu

melaksanakan pembinaan langsung ke tangan masyarakat, terutama terhadap UMKM dan Industri Rumahan.

c. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Bukittinggi sebagai Kota wisata sangat besar pengaruhnya kepada roda perekonomian di Kota Bukittinggi, sehingga bermunculan usaha-usaha perekonomian masyarakat berupa Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang terdiri dari sentra-sentra industri. UMKM atau “Usaha Mikro Kecil Menengah” selama ini mempunyai peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan jantung perekonomian di Indonesia khususnya Kota Bukittinggi. Masalah utama yang menjadi kendala adalah akses pasar dan pemanfaatan teknologi yang masih rendah karena sebagian besar masih menggunakan cara tradisional, dan kurangnya modal usaha yang mereka miliki karena takut meminjam pada Bank. Dinas P3APPKB bekerjasama dengan Dinas Pasar dan Perdagangan melakukan pembinaan secara berkala terhadap UMKM yang ada, terutama diarahkan pada perempuan kepala rumah tangga melalui industri rumah tangga. Dalam hal permodalan, dilakukan dengan bekerjasama dengan koperasi serta Bank dengan bunga yang rendah.

Selain itu, upaya pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait dalam penciptaan lapangan pekerjaan bagi perempuan seperti industri rumahan juga memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan ini.

27.4. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator:

Pencapaian indikator dari indeks pemberdayaan gender banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang bermuara pada masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang sering termarginalkan. Di Kota Bukittinggi telah diterbitkan beberapa peraturan yang berisikan pengarusutamaan gender, diantaranya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor. 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta peraturan dan keputusan walikota yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam mewujudkan perda tersebut, maka telah melahirkan berbagai program kegiatan di Dinas P3APPKB dan yang tersebar di berbagai SKPD, dengan memanfaatkan *vocal point* yang ada di SKPD se Kota Bukittinggi.

Disamping itu juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan Instansi Vertikal dan lembaga organisasi wanita dan kemasyarakatan yang ada di Kota Bukittinggi.

Kualitas sumber daya manusia, karakteristik sosial, budaya, keadaan geografi, potensi ekonomi, dan faktor-faktor lain sangat berpengaruh terhadap pencapaian pemberdayaan gender di Kota Bukittinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan lembaga terkait baik di level pusat maupun daerah. Masih rendahnya peran perempuan dalam dunia kerja tidak lepas dari budaya patriarki di negara kita, yang menganggap bahwa bekerja adalah tugas laki-laki, sedangkan perempuan cukup berputus pada masalah sumur, dapur dan kasur. Perempuan cenderung memilih



untuk tetap dekat dengan rumah karena adanya tanggung jawab keluarga. Perempuan juga cenderung menolak pekerjaan jika pekerjaan tersebut akan menjauhkan mereka dari rumah. Di beberapa wilayah di Indonesia, perempuan yang memilih untuk bekerja di rumah untuk mengasuh anaknya lebih dihargai daripada mereka yang memiliki karier sukses di luar rumah.

27.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya dengan penetapan berbagai peraturan seperti Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No.270/M.PPN / II/ 2012, Menteri Keuangan dengan No SE.33/ MK.02/ 2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/ 4370A/ SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/ MPP-PA/ II/ 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, serta beberapa peraturan lain yang mengatur penerapan kebijakan dalam rangka percepatan capaian kesetaraan gender. Selain itu, berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan oleh KPPPA dan lembaga terkait dalam rangka mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang.

Khususnya di Kota Bukittinggi telah dilaksanakan berbagai solusi, antara lain;

1. Membentuk Pokja PUG setiap tahunnya yang bertugas untuk membina, mengkoordinir dan mengawasi jalannya Pengarusutamaan Gender di SKPD.
2. Membentuk Tim *Vocal Point* yang berada di semua SKPD yang bertugas untuk melaksanakan program Pengarusutamaan Gender di SKPD.
3. Membuat Surat Edaran Rencana Aksi Pemerintah Kota Bukittinggi tentang Pengarusutamaan Gender setiap tahunnya, sebagai pedoman teknis bagi SKPD dalam pencapaian target IDG sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Membuat Surat Edaran Bersama Tim Driver (Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan, Dinas P3APPKB, Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi) Nomor. 476/ 174/ PUG/ DP3APPKB/ II- 2018, tentang Pengarusutamaan Gender,
5. Kegiatan RANDA PUG ini dievaluasi dan dilaporkan setiap Triwulan pada Staf Kepresidenan setiap tahunnya.

Jika indikator tidak mencapai target, sebagaimana yang telah ditetapkan, maka perlu komitmen pimpinan yang secara terpadu dilaksanakan di SKPD untuk bersama sama dalam mewujudkan pemberdayaan gender. Alokasi anggaran yang responsif gender perlu ditingkatkan disetiap SKPD dan pembinaan/ pengawasan dari Inspektorat perlu lebih diintensifkan. Dan mereview dan memantau jalannya kegiatan yang responsif gender.



Ket: Kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak



Ket: Bunda PAUD Kota Bukittinggi Bersama Anak-anak

27.6. Program atau Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Tabel 27.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator **Indek Pemberdayaan Gender**

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2020	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
Pelayanan dan Perlindungan Khusus anak	3.109.000	3.095.000	99,54%
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah	32.008.350	31.980.650	99,91%
Pengelolaan Data Gender dan Anak	11.520.750	11.408.750	99,02%
Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	16.337.500	16.041.250	98,18%
Pemenuhan Hak Anak	136.848.743	136.447.939	99,70%
Pembinaan Forum Anak Daerah (Forda)	5.567.750	5.567.750	100%
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	280.852.211	280.418.689	99,84%
KIE dan Advokasi Jelajah Three End	985.800	985.800	100%
Perkuatan Organisasi Perempuan	19.408.000	19.303.200	99,46%
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	112.358.644	109.398.247	97,36%
Pembinaan dan pengembangan Ekonomi Perempuan	17.164.000	17.092.000	99,58%

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2021

Sasaran V.3 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Ramah Disabilitas** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

28.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 28.1 Capaian Indikator **Indeks Ramah Disabilitas**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ramah Disabilitas	71	85.16	119.94 %

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi 2021

Data Penyandang Disabilitas Kota Bukittinggi hasil verifikasi melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada bulan November 2020, Penyandang Disabilitas Kota Bukittinggi berjumlah 566 Orang.

Bantuan dan Penanganan yang telah diterima oleh Penyandang Disabilitas Kota Bukittinggi melalui Pelatihan Bahasa Isyarat, Pelatihan Pijat Tuna Netra, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Alat Bantu Dengar, Bantuan Sembako dan Hibah melalui Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) berjumlah 482 Orang. Penyandang Disabilitas yang belum mendapat penanganan dan bantuan berjumlah 84 Orang Penyandang Disabilitas.

Capaian Indeks pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan data diatas adalah sebesar 85,16 % telah melebihi target tahun 2020 sebesar 71 %.

28.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Ramah Disabilitas** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 28.2 Perbandingan antara **Indeks Ramah Disabilitas** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Ramah Disabilitas		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	71	85.16	119.94%

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 dicapai realisasi sebesar 85,16 dengan persentase capaian target sebesar 119,94%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dan melampaui target yang telah ditetapkan.

28.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Untuk peningkatan pelayanan kepada penyandang disabilitas dilakukan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pada kantor-kantor pelayanan, perbankan, agar penyandang disabilitas mendapatkan prioritas dalam pelayanan untuk mencapai Indeks ramah disabilitas. Peningkatan kapasitas Penyandang disabilitas juga dilakukan seperti Pelatihan Pijat Tuna Netra. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Alat Bantu Dengar, Bantuan Sembako dan Hibah melalui Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat.

Pemberdayaan seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bukittinggi juga dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, serta dengan menumbuhkan wahana kesejahteraan sosial baru serta memperkuat sosialisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi pilar-pilar sosial dan PSKS lainnya, seperti Rehabilitasi Sosial

Berbasis Masyarakat, Penumbuhan Family Care Unit, peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di Kota Bukittinggi, serta dengan terus melakukan pembinaan lanjutan terhadap kapasitas organisasi sosial, Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Yayasan dan LKS yang ada di Kota Bukittinggi serta menjalin kemitraan stakeholder terkait untuk menganggarkan dana CSR untuk menciptakan Kota Bukittinggi Ramah Disabilitas.

Pada Tahun 2020 sosialisasi mengenai penumbuhan *Family Care* Unit sudah mulai dilakukan untuk menumbuhkan minat keluarga pionir (keluarga kuat) untuk membantu keluarga plasma (keluarga lemah), sehingga keluarga plasma merasakan bantuan dari keluarga pionir. Dari 13 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, 10 diantaranya sudah berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS Kota Bukittinggi termasuk pelayanan kepada disabilitas disabilitas.

Untuk itu, pada tahun mendatang diharapkan seluruh PSKS dapat berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS termasuk stakeholder yang telah menjalin kemitraan dengan Dinas Sosial, baik PSKS dari internal maupun dari masyarakat sendiri.

28.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Untuk berhasilnya sasaran Dinas Sosial dalam Mewujudkan pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas, telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran dinas sosial untuk pemenuhan Indeks Ramah Disabilitas. Diantaranya dalam penyelenggaraan program kegiatan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial untuk memberikan penguatan, bimbingan, pembinaan, kepada penyandang disabilitas sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Penyebab kegagalan salah satunya belum maksimalnya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

28.5 Program atau Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 28.5. Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Indeks Ramah Disabilitas

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
B	BELANJA LANGSUNG	3,162,026,088	2,510,770,029	79.40%
IV	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	185,820,600	172,588,700	92.88%
1	Penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan Berprestasi	185,820,600	172,588,700	92.88%
V	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	369,757,702	136,780,452	36.99%
2	Penanggulangan Orang Terlantar, Gangguan Kejiwaan dan Penguburan Mayat Terlantar	233,657,702	125,365,652	53.65%
3	Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan	45,100,000	6,439,800	14.28%
4	Perlindungan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus	91,000,000	4,975,000	5.47%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
VI	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	294,127,200	264,678,000	89.99%
5	Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan	26,100,000	8,835,100	33.85%
6	Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat dan Disabilitas	123,287,200	121,569,900	98.61%
7	Pelatihan Pijat Tuna Netra dan bahasa isyarat	144,740,000	134,273,000	92.77%
VII	Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	138,319,000	119,984,785	86.74%
8	Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan	82,569,000	71,572,735	86.68%
9	Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	55,750,000	48,412,050	86.84%
IX	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	419,189,700	410,346,050	97.89%
10	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Disabilitas dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	419,189,700	410,346,050	97.89%
X	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,754,811,886	1,406,392,042	80.14%
11	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	183,934,700	93,312,890	50.73%
12	Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana)	165,454,790	143,147,966	86.52%
13	Pelatihan Usaha Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif	53,526,850	45,574,000	85.14%
14	Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	468,364,546	414,437,086	88.49%
15	Sinkronisasi Data Terpadu dan Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM	494,788,000	384,515,460	77.71%
16	Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan	388,743,000	325,404,640	83.71%

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi 2021

SASARAN V.4 : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran V.4 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Angka Kriminalitas** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi selama 1 (satu) tahun, atau dapat dilihat melalui rumus berikut:

$$\text{Angka Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kriminalitas}}{1 \text{ (satu) Tahun}}$$

29.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 29.1. Capaian Indikator **Angka Kriminalitas**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kriminalitas	435	109	175.5%

Sumber Data: Polsek Kota Bukittinggi 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa penurunan angka kriminalitas di Kota Bukittinggi tahun 2020 telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari target hanya 435 kasus kriminalitas hanya terjadi 109 kasus selama tahun 2020.

29.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Angka Kriminalitas** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 29.2 Perbandingan antara **Angka Kriminalitas** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Angka Kriminalitas		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	490	191	161 %
2018	463	187	160 %
2019	449	124	172 %
2020	435	109	175 %

Sumber : Kantor KesbangPol Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 telah melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2020. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir, capaian kinerja tahun 2020 merupakan capaian kinerja dengan persentase tertinggi.

29.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Penurunan angka kriminalitas di Kota Bukittinggi sejak tahun 2016 hingga titikpaling rendah di tahun 2020 disebabkan oleh berbagai faktor. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi selama ini dalam menjalankan tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur yang ada. Melalui Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kota Bukittinggi terus dilakukan upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya konsep dan preventif dengan memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat terkait aturan dan dampak yang ditimbulkan.

Selanjutnya, penerapan di lapangan dalam hal pemberian sanksi terkait peristiwa yang terjadi dalam bentuk perkelahian atau perbuatan yang merugikan orang lain merupakan tugas kepolisian. Keamanan dan ketertiban masyarakat akan terwujud jika angka kriminalitas dapat ditekan. Oleh sebab itu penurunan angka kriminalitas termasuk salah satu tanggung jawab Kantor Kesbangpol selaku unit kerja pemerintah Kota yang bertugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

29.4. Analisis terhadap keberhasilan/ kegagalan pencapaian indikator

Peningkatan capaian kinerja indicator dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas masyarakat terkait situasi pandemi Covid-19. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kantor



Kesbangpol menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Kota Bukittinggi.

29.5 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Walaupun terjadi penurunan angka kriminalitas, alternatif solusi terus dilakukan dengan pencapaian indikator untuk mencapai target melalui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan intensitas pertemuan dan rapat-rapat koordinasi dengan Kepolisian, TNI, Satpol PP dan instansi lainnya dalam pencegahan terkait permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh pemuda, dan tokoh adat), untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kasus kriminalitas,
- c. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka pengendalian kasus kriminalitas dan pencegahan penyalahgunaan peredaran narkoba.

29.6. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 29.6 Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator **Angka Kriminalitas**

Program/ kegiatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Persentase Capaian
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	243.013.231	232.294.377	95.59 %
Peningkatan dan pengawasan kewaspadaan dini masyarakat	229.673.485	218.958.381	95.33 %
Optimalisasi pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik	13.339.746	13.335.996	99.97 %
Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi	20.954.000	18.330.000	87.48 %
Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	20.954.000	18.330.000	87.48 %

Sumber : Kantor KesbangPol Kota Bukittinggi

III.4 Realisasi Anggaran

Untuk setiap kegiatan yang mendukung kinerja memerlukan anggaran dalam pelaksanaannya. Berikut disajikan Realisasi anggaran utama tahun 2020 yang mendukung langsung ataupun tidak langsung pencapaian 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020:

Pada tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi setelah perubahan adalah sebesar Rp. 883.714.285.381,10 dengan realisasi sebesar Rp. 796.660.536.289,95 dengan persentase realisasi sebesar 90,14%).



Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah	Realisasi	
	Anggaran	Keuangan	%
1	2	3	4
BELANJA	883.714.285.381,10	796.660.536.289,95	90.14
BELANJA TIDAK LANGSUNG	390.560.477.010,00	355.265.858.354,07	90.96
Belanja Pegawai	297.083.746.247,00	284.957.684.885,57	95.91
Belanja Hibah	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	89.65
Belanja Bantuan Sosial	1.865.000.000,00	417.550.000,00	22.38
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	735.647.526,00	706.056.990,00	95.97
Belanja Tidak Terduga	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	64.48
BELANJA LANGSUNG	493.153.808.371,10	441.394.677.935,88	89.5
Belanja Pegawai	40.784.649.741,00	35.993.085.611,00	88.25
Belanja Barang dan Jasa	191.726.993.198,10	156.083.978.509,56	81.4
Belanja Modal	260.642.165.432,00	249.317.613.815,32	95.65

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2021

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pemerintah Kota Bukittinggi secara serius dan berkomitmen tinggi atas terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil dan output dari implementasi SAKIP dapat dilihat dengan jelas dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bukittinggi.

LAKIP Kota Bukittinggi Tahun 2020 berhasil menyajikan keberhasilan dan kemajuan maupun kendala yang dihadapi dalam capaian setiap sasaran strategis melalui target Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan setiap IKU telah dibandingkan perkembangannya dari tahun ke tahun. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen yang ada termasuk, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* termasuk kondisi pandemi Covid-19 yang melanda.

Berdasarkan uraian yang dituangkan pada BAB III LAKIP dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. LAKIP Kota Bukittinggi Tahun 2020 memberikan informasi kepada *stakeholders* atas keberhasilan/ kegagalan pencapaian 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis yang diukur oleh 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020.
2. Pencapaian 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.883.714.285.381,10,-, dengan realisasi sebesar Rp.796.660.536.289,95 (90.14%).
3. Kategori keberhasilan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 8 IKU berhasil dengan kategori **Memuaskan** dengan capaian >100%.
 - b. Sebanyak 8 IKU berhasil dengan kategori **Sangat Baik** dengan capaian >86% -100%.
 - c. Sebanyak 2 IKU berhasil dengan kategori **Baik** dengan capaian >56% - 85,99%.
 - d. Sebanyak 4 IKU berhasil dengan kategori **Cukup** dengan capaian 55% - 74,9%
 - e. Sebanyak 7 IKU berhasil dengan kategori **Kurang Baik** dengan capaian ≤ 56%.



4. Sasaran strategis Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang diukur oleh IKU Angka Kriminalitas berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 175.5%.
5. Sasaran strategis Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer, Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder, Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier, yang diukur oleh IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Primer, Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder, Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier berhasil dengan capaian kinerja terendah sebesar masing -9.3 %, -41.26 %, -30.3 %.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dirancang untuk mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan efisiensi dan efektivitas dalam setiap penggunaan anggaran. Implementasi SAKIP, akan mendorong terjadinya konsep *Money Follows Program* dalam artian bahwa alokasi anggaran digunakan untuk semaksimalnya pada program dan kegiatan yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja dan implementasi SAKIP pada tahun 2020 diantaranya:

1. Mengoptimalkan koordinasi antar tim implementasi SAKIP Kota Bukittinggi sehingga didapatkan pedoman terhadap beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP 2019 dari KemenPanRB dengan komitmen melakukan tindaklanjut dan perbaikan pada SAKIP 2020.
2. Melakukan pembenahan terhadap dokumen SAKIP serta berupaya agar terdapat keselarasan diantara dokumen-dokumen yang ada dengan melakukan penyesuaian kembali dari tujuan dan sasaran terhadap turunannya berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga seluruh SKPD yang ada di Kota Bukittinggi yang dibebankan atas IKUnya masing-masing turut bertanggungjawab atas tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Rutin melakukan rapat evaluasi bersama Tim Implementasi SAKIP dan SKPD untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam upaya peningkatan capaian kinerja;
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah terus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator kinerja utama yang harus dicapai akan lebih mudah diwujudkan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah baik vertikal maupun horizontal pusat dan daerah dalam penyelenggaraan SAKIP yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Disamping itu Pemerintah Kota Bukittinggi juga berupaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, diantaranya:



1. Seiring dengan akan disusunnya RPJMD 2021-2024 dalam rumusan Visi dan Misi Walikota Bukittinggi terpilih hasil Pemilu Tahun 2020, tim implementasi SAKIP Kota Bukittinggi akan menyelaraskan setiap program dan kegiatan yang akan menjadi tanggung jawab tiap-tiap SKPD melalui IKU yang akan ditetapkan agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat diwujudkan dengan efektif dan efisien.
2. Agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Pemerintah Kota Bukittinggi juga akan melaksanakan evaluasi kelembagaan dengan melakukan penguatan dan restrukturisasi terhadap tugas dan fungsi masing-masing SKPD termasuk nomenklatur yang ada didalamnya, agar seluruh urusan pemerintah daerah dapat terbagi habis dengan baik secara efektif dan efisien dalam setiap tugas dan fungsi.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

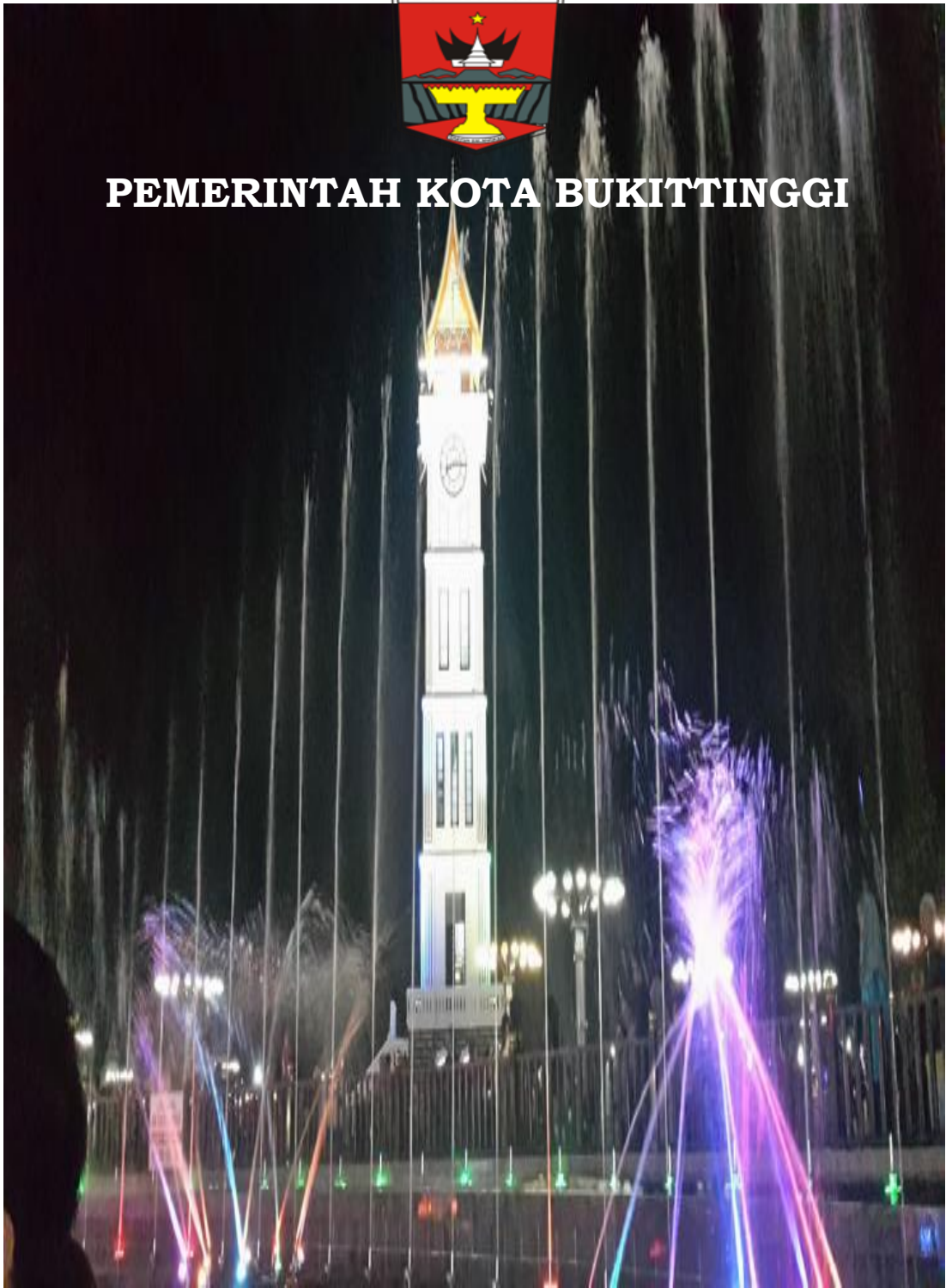
Bukittinggi, Maret 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

H. ERMAN SAFAR, SH



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



PERJANJIAN

KINERJA

2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. M. RAMLAN NURMATIAS, S.H.
Jabatan : WALIKOTA BUKITTINGGI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bukittinggi, 29 Januari 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KOTA BUKITTINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1.	Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%
2.	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	2.	Rasio Corporate Social Responsibility dengan Belanja Langsung APBD dalam pembiayaan pembangunan	2,5%
3.	Terlaksananya reformasi birokrasi	3.	Nilai SAKIP	SAKIP A
		4.	Peringkat LPPD	LPPD Ranking 30
		5.	Indeks RB	B
		6.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
		7.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	80
4.	Terpenuhinya RTH Kota	8.	Persentase RTH Publik	17%
5.	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	9.	Persentase fasum yang representatif dan memenuhi standar lingkungan	90%
6.	Pemenuhan target <i>universal access</i> (sanitasi, air bersih dan pemukiman kumuh)	10.	Penyediaan air minum layak	100%
		11.	Kawasan kumuh	0 Ha
		12.	Persentase sanitasi layak	100%
7.	Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	13.	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	70%
8.	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	14.	Pertumbuhan ekonomi	6,50%
		15.	PDRB per kapita	56 juta
		16.	Indeks Gini	<0,3
		17.	Jumlah Investasi	65%
9.	Menurunnya tingkat kemiskinan	18.	Tingkat kemiskinan	2,84
10.	Meningkatnya pelayanan pariwisata	19.	Kunjungan wisatawan	588.245 orang
11.	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	20.	Harapan lama sekolah	15 tahun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
12.	Meningkatkan kualitas pendidikan	21.	Persentase sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	81,35%
		22.	Persentase sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	90,90%
13.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	23.	Angka harapan hidup	73,14 tahun
14.	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	24.	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100%
15.	Terjaganya stabilitas harga	25.	Tingkat inflasi	3,00
16.	Terkendalinya jumlah penduduk	26.	Laju pertumbuhan penduduk	1,38

Bukittinggi, 29 Januari 2020


 W A L I K O T A B U K I T T I N G G I,
Mama S.
 M. RAMLAN NURMATIAS

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.426.535.604
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.438.264.918
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	1.847.110.500
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.029.495.798
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	187.562.317
6.	PAUD	720.180.750
7.	Wajar Sembilan Tahun	46.747.045.620
8.	Pendidikan Non Formal	1.029.870.000
9.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.318.874.929
10.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	412.014.000
11.	BOS	14.289.800.000
12.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	768.862.000
13.	Upaya Kesehatan Masyarakat	8.470.315.235
14.	Pengawasan Obat dan Makanan	274.204.840
15.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	510.262.923
16.	Perbaikan Gizi Masyarakat	153.038.000
17.	Pengembangan Lingkungan Sehat	623.329.500
18.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.915.834.237
19.	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	660.412.000
20.	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	3.100.995.500
21.	Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	118.730.948.162
22.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	63.201.000
23.	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	45.280.500

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
24.	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	376.505.000
25.	Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	27.710.500
26.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	257.133.984
27.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	11.261.373.985
28.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	4.256.718.184
29.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	11.341.841.320
30.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.255.016.199
31.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	977.324.478
32.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3.394.766.904
33.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.100.000.000
34.	Perencanaan Tata Ruang	826.811.404
35.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	411.562.428
36.	Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum	73.961.916.399
37.	Pengelolaan Pembangunan Gedung	137.696.000
38.	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	6.352.735.554
39.	Pengaturan Jasa Konstruksi	317.720.000
40.	Pengembangan Perumahan	3.370.024.570
41.	Lingkungan Sehat Perumahan	8.002.412.982
42.	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	3.543.370.130
43.	Pengelolaan Areal Pemakaman	66.594.000
44.	Peningkatan Kesiagaan dan Pecegahan Bahaya Kebakaran	505.143.930
45.	Peningkatan Penanggulangan Kebakaran	1.726.434.064
46.	Pemeliharaan Katrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	9.808.523.857

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
47.	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	666.733.000
48.	Sistem Kebencanaan	379.272.150
49.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.176.793.292
50.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	221.260.485
51.	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	17.886.250
52.	Pendidikan Politik Masyarakat	3.000.920.000
53.	Pencegahan, Penanggulangan dan Rehabilitasi Narkoba	62.460.250
54.	Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	177.080.000
55.	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	184.330.000
56.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	441.735.100
57.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	354.764.692
58.	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	609.238.000
59.	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	84.000.000
60.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	206.569.000
61.	Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	621.608.000
62.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.750.364.336
63.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	137.634.200
64.	Peningkatan Kesempatan Kerja	39.474.500
65.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	47.438.450
66.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perlindungan Perempuan	38.255.500
67.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	414.829.461
68.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	819.735.496
69.	Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	758.916.211

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
70.	Peningkatan Ketahanan Pangan	84.329.500
71.	Peningkatan Diversifikasi Pangan	162.801.250
72.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	222.966.476
73.	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	985.754.762
74.	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	99.439.860
75.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	17.276.257.169
76.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	505.021.150
77.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	750.990.250
78.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.068.735.067
79.	Penataan Administrasi Kependudukan	1.947.927.186
80.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	11.050.607.500
81.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	376.438.750
82.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	392.380.844
83.	Keluarga Berencana	2.295.445.422
84.	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	368.103.000
85.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	80.702.500
86.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4.412.612.776
87.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	198.528.000
88.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	79.506.000
89.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.507.229.700
90.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	374.110.900
91.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.239.892.984
92.	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	155.875.850

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
93.	Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa	379.182.935
94.	Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)	769.682.100
95.	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	10.000.000
96.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	87.390.435
97.	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	256.004.830
98.	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah	473.547.390
99.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	146.067.000
100.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	32.490.000
101.	Peningkatan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	174.194.000
102.	Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	710.810.363
103.	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2.476.272.500
104.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	870.755.232
105.	Pembinaan Kepemudaan	1.441.282.000
106.	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	13.073.000
107.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	76.988.500
108.	Pengembangan Nilai Budaya	1.012.500.000
109.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.310.624.711
110.	Pengelolaan Keragaman Budaya	50.000.000
111.	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	167.000.000
112.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	364.612.711
113.	Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan	51.053.500
114.	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	120.890.250
115.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	81.279.250

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
116.	Pengembangan Budidaya Perikanan	354.909.450
117.	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	207.787.737
118.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.276.240.751
119.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	28.199.615.813
120.	Kemitraan Pariwisata	416.205.000
121.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	85.859.411
122.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.914.041.000
123.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	254.398.562
124.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	313.914.100
125.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	82.107.500
126.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	3.363.402.273
127.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	831.771.000
128.	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1.111.538.182
129.	Peningkatan, Pengembangan Sarana Prasarana Pasar	6.603.795.787
130.	Pengawasan dan Penertiban Pasar	1.331.309.333
131.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	534.048.250
132.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	849.093.635
133.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	11.298.561.147
134.	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	101.000.000
135.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	607.058.750
136.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	119.260.500
137.	Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	230.833.000
138.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	127.468.890

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
139.	Peningkatan Peran Kehumasan	1.583.640.500
140.	Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan Masyarakat	6.726.604.050
141.	Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	205.000.000
142.	Pengembangan Potensi Ekonomi	207.988.000
143.	Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah	95.008.000
144.	Pengelolaan Administrasi Pembangunan	988.786.835
145.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	117.525.000
146.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	14.884.656.946
147.	Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	4.846.476.449
148.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.377.934.300
149.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	588.601.000
150.	Pengembangan Data/Informasi	389.838.712
151.	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	152.391.328
152.	Perencanaan Pembangunan Kota-Kota Menengah dan Besar	344.097.000
153.	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.707.416.448
154.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	130.772.380
155.	Perencanaan Sosial dan Budaya	710.796.500
156.	Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	1.097.738.050
157.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.057.048.294
158.	Peningkatan Penerimaan PAD	1.879.215.946
159.	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3.256.864.772
160.	Pendidikan Kedinasan	782.533.212
161.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	866.156.310

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
162.	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	420.201.924
163.	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	686.226.150
Jumlah		625.283.168.357

Bukittinggi, 29 Januari 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS





PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. M. RAMLAN NURMATIAS, S.H.
Jabatan : WALIKOTA BUKITTINGGI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bukittinggi, 3 Agustus 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI



Ramlan S

H.M. RAMLAN NURMATIAS, S.H.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KOTA BUKITTINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.1.1.	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Persentase program/kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100
1.1.2.	Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	2.	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	5
1.1.3.	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3.	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	100
2.1.1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4.	Nilai SAKIP	A
		5.	Nilai EKPPD	3,365
2.1.2.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	6.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
		7.	Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK	1
2.1.3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	80
2.1.4.	Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	9.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	13,7
3.1.1.	Peningkatan Kualitas Jalan	10.	Indeks Jalan Mantap	100
3.1.2.	Peningkatan Kualitas Air Minum	11.	Indeks Air Minum Layak	95
3.1.3.	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	12.	Indeks Akses Sanitasi Layak	100
		13.	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	99,80

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KOTA BUKITTINGGI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.1.1.	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Persentase program/kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100
1.1.2.	Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	2.	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	5
1.1.3.	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3.	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	100
2.1.1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4.	Nilai SAKIP	A
		5.	Nilai EKPPD	3,365
2.1.2.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	6.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
		7.	Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK	1
2.1.3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	80
2.1.4.	Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	9.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	13,7
3.1.1.	Peningkatan Kualitas Jalan	10.	Indeks Jalan Mantap	100
3.1.2.	Peningkatan Kualitas Air Minum	11.	Indeks Air Minum Layak	95
3.1.3.	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	12.	Indeks Akses Sanitasi Layak	100
		13.	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	99,80

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
3.1.4.	Peningkatan Kepemilikan Rumah	14.	Indeks Kepemilikan Rumah	71,56
3.1.5.	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	15.	Indeks Kualitas Air	83,98
3.1.6.	Meningkatnya Kualitas Udara	16.	Indeks Kualitas Udara	88,37
3.1.7.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	17.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,46
3.2.1.	Peningkatan Pelayanan Transportasi	18.	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80
		19.	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	170
4.1.1.	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer	20.	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	3,31
4.1.2.	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder	21.	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6,30
4.1.3.	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier	22.	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9,57
4.1.4.	Penurunan Kemiskinan	23.	Tingkat Kemiskinan	3,35
5.1.1	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	24.	Harapan Lama Sekolah	14,9
		25.	Angka Rata Rata Lama Sekolah	11,33
5.1.2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	26.	Usia Harapan Hidup	74,52
5.2.3	Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas	27.	Indek Pemberdayaan Gender	74,84
		28.	Indeks Ramah Disabilitas	71
5.2.4	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29.	Angka Kriminalitas	435

Bukittinggi, 3 Agustus 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI



Dama S

M. RAMLAN NURMATIAS, S.H.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.426.535.604
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.438.264.918
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	1.847.110.500
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.029.495.798
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	187.562.317
6.	PAUD	720.180.750
7.	Wajar Sembilan Tahun	46.747.045.620
8.	Pendidikan Non Formal	1.029.870.000
9.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.318.874.929
10.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	412.014.000
11.	BOS	14.289.800.000
12.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	768.862.000
13.	Upaya Kesehatan Masyarakat	8.470.315.235
14.	Pengawasan Obat dan Makanan	274.204.840
15.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	510.262.923
16.	Perbaikan Gizi Masyarakat	153.038.000
17.	Pengembangan Lingkungan Sehat	623.329.500
18.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.915.834.237
19.	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	660.412.000
20.	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	3.100.995.500
21.	Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	118.730.948.162
22.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	63.201.000
23.	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	45.280.500

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
24.	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	376.505.000
25.	Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	27.710.500
26.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	257.133.984
27.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	11.261.373.985
28.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	4.256.718.184
29.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	11.341.841.320
30.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.255.016.199
31.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	977.324.478
32.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	3.394.766.904
33.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.100.000.000
34.	Perencanaan Tata Ruang	826.811.404
35.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	411.562.428
36.	Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum	73.961.916.399
37.	Pengelolaan Pembangunan Gedung	137.696.000
38.	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	6.352.735.554
39.	Pengaturan Jasa Konstruksi	317.720.000
40.	Pengembangan Perumahan	3.370.024.570
41.	Lingkungan Sehat Perumahan	8.002.412.982
42.	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	3.543.370.130
43.	Pengelolaan Area Pemakaman	66.594.000
44.	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	505.143.930
45.	Peningkatan Penanggulangan Kebakaran	1.726.434.064
46.	Pemeliharaan Katrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	9.808.523.857

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
47.	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	666.733.000
48.	Sistem Kebencanaan	379.272.150
49.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.176.793.292
50.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	221.260.485
51.	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	17.886.250
52.	Pendidikan Politik Masyarakat	3.000.920.000
53.	Pencegahan, Penanggulangan dan Rehabilitasi Narkoba	62.460.250
54.	Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	177.080.000
55.	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	184.330.000
56.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	441.735.100
57.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	354.764.692
58.	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	609.238.000
59.	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	84.000.000
60.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	206.569.000
61.	Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	621.608.000
62.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.750.364.336
63.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	137.634.200
64.	Peningkatan Kesempatan Kerja	39.474.500
65.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	47.438.450
66.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perlindungan Perempuan	38.255.500
67.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	414.829.461
68.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	819.735.496
69.	Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	758.916.211

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
70.	Peningkatan Ketahanan Pangan	84.329.500
71.	Peningkatan Diversifikasi Pangan	162.801.250
72.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	222.966.476
73.	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	985.754.762
74.	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	99.439.860
75.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	17.276.257.169
76.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	505.021.150
77.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	750.990.250
78.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.068.735.067
79.	Penataan Administrasi Kependudukan	1.947.927.186
80.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	11.050.607.500
81.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	376.438.750
82.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	392.380.844
83.	Keluarga Berencana	2.295.445.422
84.	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	368.103.000
85.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	80.702.500
86.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4.412.612.776
87.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	198.528.000
88.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	79.506.000
89.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.507.229.700
90.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	374.110.900
91.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.239.892.984
92.	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	155.875.850

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
93.	Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa	379.182.935
94.	Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)	769.682.100
95.	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	10.000.000
96.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	87.390.435
97.	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	256.004.830
98.	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah	473.547.390
99.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	146.067.000
100.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasai Investasi	32.490.000
101.	Peningkatan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	174.194.000
102.	Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	710.810.363
103.	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2.476.272.500
104.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	870.755.232
105.	Pembinaan Kepemudaan	1.441.282.000
106.	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	13.073.000
107.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	76.988.500
108.	Pengembangan Nilai Budaya	1.012.500.000
109.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.310.624.711
110.	Pengelolaan Keragaman Budaya	50.000.000
111.	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	167.000.000
112.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	364.612.711
113.	Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan	51.053.500
114.	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	120.890.250
115.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	81.279.250

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
116.	Pengembangan Budidaya Perikanan	354.909.450
117.	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	207.787.737
118.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.276.240.751
119.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	28.199.615.813
120.	Kemitraan Pariwisata	416.205.000
121.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	85.859.411
122.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.914.041.000
123.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	254.398.562
124.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	313.914.100
125.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	82.107.500
126.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	3.363.402.273
127.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	831.771.000
128.	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1.111.538.182
129.	Peningkatan, Pengembangan Sarana Prasarana Pasar	6.603.795.787
130.	Pengawasan dan Penertiban Pasar	1.331.309.333
131.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	534.048.250
132.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	849.093.635
133.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	11.298.561.147
134.	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	101.000.000
135.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	607.058.750
136.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	119.260.500
137.	Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	230.833.000
138.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	127.468.890

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
139.	Peningkatan Peran Kehumasan	1.583.640.500
140.	Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat Dan Keagamaan Masyarakat	6.726.604.050
141.	Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	205.000.000
142.	Pengembangan Potensi Ekonomi	207.988.000
143.	Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah	95.008.000
144.	Pengelolaan Administrasi Pembangunan	988.786.835
145.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	117.525.000
146.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	14.884.656.946
147.	Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	4.846.476.449
148.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.377.934.300
149.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	588.601.000
150.	Pengembangan Data/Informasi	389.838.712
151.	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	152.391.328
152.	Perencanaan Pembangunan Kota-Kota Menengah dan Besar	344.097.000
153.	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.707.416.448
154.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	130.772.380
155.	Perencanaan Sosial dan Budaya	710.796.500
156.	Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	1.097.738.050
157.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.057.048.294
158.	Peningkatan Penerimaan PAD	1.879.215.946
159.	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3.256.864.772
160.	Pendidikan Kedinasan	782.533.212
161.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	866.156.310

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
162.	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	420.201.924
163.	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	686.226.150
Jumlah		625.283.168.357

Bukittinggi, 3 Agustus 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI



M. Nurmatias

H. M. NURMATIAS, S.H.